



**PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Rusma Putri Nurjati

3201415040

**JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi jurusan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Mei 2020

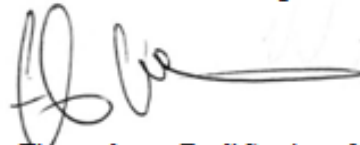
Yang Menyetujui

Dosen Pembimbing



Sriyanto, S.Pd. M.Pd
NIP.197707222005011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Geografi



Dr. Tyaturahono Budi Sanjoto, M.si
NIP. 196210191988031002



PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sos
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Drs. Moch. Arifien, M.Si
NIP.195508261983031003

Wahyu Setyaningsih, ST, MT
NIP.197912222006042001

Sriyanto, S.Pd, M.Pd
NIP.197707222005011001



Mengetahui
Dekan

Dr. Moch. Solihatul Mustofa, M.A
NIP.196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Rusma Putri Nurjati
3201415040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak (Q.S. Al-Baqarah: 216).

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ruslan dan Ibu Rokhimah, yang telah memberi dukungan terhadap saya selama ini dan selalu memberikan yang terbaik untuk saya.
2. Kedua kakak saya yaitu Nurul Pratiwi dan Pinesthi Laksa Ambawani yang selalu memberi semangat.
3. Teman-teman seperjuangan saya, teman satu prodi Pendidikan Geografi 2015
4. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

SARI

Nurjati, Rusma Putri. 2020. *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018.* Skripsi, Jurusan Geografi, FIS Unnes, Pembimbing Sriyanto, S.Pd., M.Pd.142 halaman.

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan menjadi lebih cerdas selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang diikuti oleh warga Indonesia atas tanggung jawab pemerintah daerah. 1.140 anak usia sekolah di Kecamatan Suradadi tidak melanjutkan pendidikan. Masalah dalam penelitian ini: (1) bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun? (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun atau biasa disebut dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang telah dilaksanakn oleh beberapa sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Teknik pengumpulan data menggunakan angket wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan tabulasi silang atau crosstab.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selamat 3 periode (tahun 2016-2018) mengalami kenaikan. Tingkat APK mengalami kenaikan sebesar 1,58% dan tingkat APM sebesar 1,33%. Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, antara lain: tingkat pendapatan orangtua tergolong rendah yaitu kurang dari Rp. 1.500.000, tingkat pendidikan terakhir orangtua rata-rata di tingkat SD, jenis pekerjaan orangtua rata-rata sebagai nelayan, keluarga mendukung anak untuk sekolah waktu yang dibutuhkan anak untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah 10-15 menit dengan jarak tempuh 3km-5km dan jumlah rata-rata keluarga inti adalah 5 orang.

Saran dari penelitian ini yaitu: Dinas Pendidikan harus memastikan informasi program wajib belajar 12 tahun, agar masyarakat mengetahui informasi terbaru, negara bertanggungjawab atas anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Wajib Belajar 12 tahun, Sekolah Menengah Atas.

ABSTRACT

Nurjati, Rusma Putri. 2020. "Implementation of the 12-Years Compulsory Education Program in Suradadi Tegal 2018". Scription. Department of Geography, FIS UNNES, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Sriyanto, S.Pd., M.Pd.142 pages.

Education is an important element in development, because with education the community will become smarter and subsequently will form high quality Human Resources (HR). Compulsory education is a minimum education program that is followed by Indonesian citizens for local government responsibility. 1,140 school-aged children in Suradadi did not continue their education. Problems in this study: (1) how is the implementation of the 12 year compulsory education program? (2) factors that hinder the implementation of the 12-year compulsory education program in Suradadi District.

The purpose of this study is to describe the implementation of the 12-year compulsory education program or commonly called Pendidikan Menengah Universal (PMU) which has been carried out by several schools in Suradadi, Tegal. This research is descriptive research. The subjects of this study were parents who had junior high school graduates who did not proceed to the next level. Data collection techniques using interview and documentation questionnaires. Data analysis techniques used are descriptive analysis and cross tabulation.

The results of this study indicate that the implementation of the 12 year compulsory education program in Suradadi, Tegal survived 3 periods (in 2016-2018) experiencing an increase. The APK rate increased by 1.58% and the APM rate was 1.33%. Obstacles to the implementation of the 12-year compulsory education program in Suradadi, Tegal, among others: the level of parents' income is relatively low, namely less than Rp. 1,500,000, the average level of education of parents at primary school level is 57.8%, the majority of parents work as fishermen, families support children for school by 89.4%, the time needed for children to travel from home to school 10 -15 minutes by 50.8% with a distance of 3km-5km by 47.3% and the average number of nuclear families is 5 people or 59.6%.

Suggestions from this research are: The Office of Education must ensure information on 12-year compulsory education programs, so that the public knows the latest information, the state is responsible for children who are less able to get free education.

Keywords: Implementation, 12-year compulsory education program, high school.

PRAKATA

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018. Penulisan skripsi dapat terselesaikan oleh bantuan tenaga, pikiran, dan waktu dari Sriyanto, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing penulis dan juga dari berbagai pihak antara lain:

1. Prof. Dr. Fakhur Rokhman M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijinnya untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan perijinan penelitian sehingga penulis lancar dalam menyelesaikan skripsi
3. Dr.Tjaturahono Budi Sanjoto M.si., Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan ijin diselenggarakannya sidang skripsi penulis
4. Drs. Moch. Arifien, M.Si., penguji I dalam sidang skripsi penulis yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk menguji dan memberikan masukan
5. Wahyu Setyaningsih, ST, MTi., selaku penguji II dalam sidang skripsi penulis yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk menguji dan memberikan masukan
6. Para Dosen Jurusan Geografi atas ilmu yang telah diberikan selama menempuh studi di Jurusan Geografi.

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Rusma Putri Nurjati
3201415040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Batasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	9
2.1. Deskripsi Teoritis.....	9
2.1.1. Pengertian Pendidikan	9
2.1.1.1. Pendidikan Formal	10
2.1.1.2. Pendidikan Non Formal	11

2.1.1.3. Pendidikan Informal	11
2.1.2. Pelaksanaan Wajib Belajar.....	12
2.1.2.1 Kecukupan Tenaga Pendidik.....	14
2.1.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana.....	15
2.1.2.3 Ketersediaan Pembiayaan Pendidikan	15
2.1.3. APK dan APM.....	16
2.1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	18
2.1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM).....	19
2.1.3.3 Rata-Rata Lama Sekolah	19
2.1.4. Tujuan dan Target Wajib Belajar	20
2.1.5. Tantangan dalam Wajib Belajar	21
2.1.6. Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar	25
2.2. Penelitian Relevan.....	32
2.3. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Populasi Penelitian.....	39
3.2. Sample dan Teknik Sampling	39
3.3. Variabel Penelitian	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data	42
3.5. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	46

4.1.2 Kondisi Penduduk Daerah Penelitian	49
4.2 Hasil Penelitian	54
4.2.1 Tingkat APK dan APM di Kabupaten Tegal	55
4.2.2 Perbandingan Antara Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang Sekolah dan Tidak Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten tegal Tahun 2018.....	57
4.2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.....	58
4.2.4 Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di SMA/MA/SMK di Kecaatan Suradadi Kabupaten Tegal	70
4.3 Hambatan- Hambatan Program Wajib Belajar	76
4.3.1 Tingkat Pendidikan Orangtua	76
4.3.2 Tingkat Pendapatan Orangtua	79
4.3.3 Tanggungan Orangtua.....	83
4.3.4 Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal	85
4.3.5 Faktor Jarak dari Rumah ke Sekolah	90
4.3.6 Fasilitas Jalan yang Dilalui	92
4.3.7 Transportasi yang Digunakan	94
BAB V PENUTUP	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Angka APK dan APM.....	17
Tabel 2.1. IPM	17
Tabel 2.2 Penelitian Relevan.....	32
Tabel 3.1 Jumlah Orangtua	39
Tabel 3.2 Perhitungan Persebaran Sample.....	41
Tabel 4.1 Banyaknya Perdukahan RT dan RW	48
Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan	48
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	51
Tabel 4.5 Banyaknya Rumah Tangga/ Rata-rata Orang Rumah Tangga.....	51
Tabel 4.6 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan	52
Tabel 4.7 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	53
Tabel 4.8 Data Apk dan APM Siswa	56
Tabel 4.9 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang Sekolah dan Tidak Sekolah.....	58
Tabel 4.10 Data Peserta Didik	72
Tabel 4.11 Data Guru dan tenaga Kependidikan	72
Tabel 4.12 Jumlah Rombongan Belajar	72
Tabel 4.13 Data Bangunan/ Ruangan Lain	72
Tabel 4.14 Data Guru dan Tenaga Kependidikan.....	73
Tabel 4.15 Jumlah Rombongan Belajar	74
Tabel 4.16 Data Bangunan.....	74
Tabel 4.17 Data Guru dan Tenaga Kependidikan.....	75

Tabel 4.18 Jumlah Rombongan Belajar	75
Tabel 4.19 Data Bangunan/ Ruang Lain	76
Tabel 4.20 Tingkat Pendidikan Orantu	77
Tabel 4.21 Tabel Pendidikan Non Fromal	78
Tabel 4.22 Tingkat Pendidikan Formal.....	78
Tabel 4.23 Lamanya Sekolah Non-Formal	79
Tabel 4.24 Tingkat Pendapatan Orangtua.....	79
Tabel 4.25 Pendapatan Sampingan	81
Tabel 4.26 Total Pengeluaran Keluarga.....	82
Tabel 4.27 Kecukupan Kebutuhan Sehari-Hari	82
Tabel 4.28 Jumlah Tnaggungan Orangtua	83
Tabel 4.29 Jumlah Anak	84
Tabel 4.30 Jumlah Anggota Keluarga Inti	85
Tabel 4.31 Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal	85
Tabel 4.32 Waktu yang Dibutuhkan untuk Membimbing Belajar	86
Tabel 4.33 Alasan Anak Tidak Melanjutkan Sekolah	87
Tabel 4.34 Sosialisasi Wajib Belajar	88
Tabel 4.35 Tujuan Menyekolahkan Anka.....	89
Tabel 4.36 Waktu yang Dibutuhkan dari Rumah ke Sekolah.....	90
Tabel 4.37 Jarak dari Rumah ke Sekolah.....	91
Tabel 4.38 Jenis Jalan yang di Lalui	92
Tabel 4.39 Kondisi Jalan.....	93
Tabel 4.40 Situasi Jalan.....	93
Tabel 4.41 Kendaraan yang Digunakan	94

Tabel 4.42 Angkutan Umum.....	95
Tabel 4.43 Transportasi Umum yang Ada disekitar	96
Tabel 4.44 Biaya yang dikeluarkan Menggunakan Angkutan Umum	96
Tabel 4.45 Tingkat Kemaceta	96
Tabel 4.46 Kemudahan dalam Mengakses Angkutan Umum.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir	38
Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian	47
Gambar 4.2 Grafik Tingkat APK dan APM.....	58
Gambar 4.3 Desa Karangwuluh	61
Gambar 4.4 Desa Gembongdadi	62
Gambar 4.5 Desa Karangwuluh	63
Gambar 4.6 Desa Harjasari	64
Gambar 4.7 Desa Kertasari	65
Gambar 4.8 Desa Jatimulya	66
Gambar 4.9 Desa Sidoharjo	67
Gambar 4.10 Desa Sidoharjo	68
Gambar 4.11 Desa Purwahamba	69
Gambar 4.12 Desa Suradadi.....	70
Gambar 4.12 Desa Bojongsana.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Metode Pengumpulan Data	108
Lampiran 2. Lembar Dokumentasi	110
Lampiran 3. Kisi-Kisi Instrumen Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten tegal.....	111
Lampiran 4. Angket Penelitian	113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang (Talman, dkk:2016). Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan secara jelas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan yang berimbang akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. (Dikdasmen, 2009:59).

Dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat kebijaksanaan, yaitu membuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Dewi, Sriyanto, 2019)

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya kebijakan program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar ini tercantum dalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Pengertian belajar menurut Fry, Keteridge, dan Marshall (2008, p.8) *“Learning is not single thing; it may involve mastering abstract principles, understanding proofs, remembering factual information, acquiring methods, techniques and approaches, recognition, reasoning, debating ideas, or developing behaviour appropriate to specific situations; it is about change.”* yang berarti bahwa belajar bukan satu hal, namun mungkin melibatkan penguasaan prinsip-prinsip abstrak, memahami bukti, mengingat informasi aktual, memperoleh metode, teknik dan pendekatan, pengakuan, penalaran, berdebat ide, atau mengembangkan perilaku yang sesuai dengan situasi tertentu. Oleh karena itu, belajar adalah tentang perubahan sebelum dan sesudah belajar.

Wajib belajar merupakan program yang mewajibkan semua anak usia sekolah mengikuti proses belajar sesuai tingkat umurnya, sejak dikeluarkannya Inpres No 10 Tahun 1973, pemerintah secara terencana meningkatkan

pembangunan sarana pendidikan dasar. Pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Wajib Belajar Enam Tahun untuk anak usia 7-12 tahun secara nasional, kemudian Pemerintah Indonesia melanjutkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sejak bulan Mei tahun 1994. Dan kembali Pemerintah Indonesia sebagai kelanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla mencanangkan Program Indonesia Pintar. Program ini memiliki fokus utama pada implementasi Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, dengan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi anak-anak usia 7-18 tahun sampai jenjang menengah atau dari SD MI sampai SMA/SMK/MA. (Talman, dkk:2016)

Menurut Sparta (Rothbard, 1999, p.19) mengatakan *“The full logical conclusion of the compulsory system; absolute State control over the “whole child”, uniformity and education in passive obedience to State orders”*. Keseluruhan kesimpulan logis dari sistem wajib belajar adalah kendali penuh negara terhadap “seluruh anak”, keseragaman dan pendidikan diatur pada perintah negara. Oleh karena itu, keseluruhan dari sistem wajib belajar diatur khusus oleh undang-undang setiap negara yang melaksanakan wajib belajar. Sekolah-sekolah yang melaksanakan program wajib belajar harus memenuhi standar instruksi yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan.

Menurut Seel (2012, p.697) mengatakan bahwa *“Compulsory education refers to the most crucial period of formal education required by law of all children between certain ages in a given country”*. Seel menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan

oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia tertentu berdasarkan undang-undang negara tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Sensus Penduduk (SP) 2000 jumlah penduduk Indonesia adalah 206,3 juta jiwa, dan pada tahun 2010 menjadi 237 juta jiwa. Sedangkan hingga 2018 ini disebutkan berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa, jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Dengan jumlah penduduk yang besar ini tentu tidak sebanding dengan kualitas SDM-nya. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, kualitas SDM Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini dapat diketahui dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), yang mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita. Berdasarkan data BPS 2017, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, angka IPM Jawa Tengah menduduki peringkat ke 13 dengan nilai 70,52. Nilai tersebut dapat digolongkan kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah semakin baik, akan tetapi masih ada beberapa kabupaten yang memiliki Angka Partisipasi Kasar rendah yang masih jauh dari target pemerintah daerah, salah satunya adalah Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, dengan luas wilayah 876,1 km². Kabupaten Tegal terdiri dari 11 kecamatan. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tegal merupakan salah satu alasan yang menggerakkan pelaksanaan Program Wajib Belajar. Dari SD, SMP dan SMA.

Diantara jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. APK dan APM terendah terdapat pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut adalah data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) per-Kecamatan di Kabupaten Tegal 2018.

Tabel 1.1 APK dan APM kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	APK	APM
1.	Adiwerna	114%	122%
2.	Slawi	99,6%	64%
3.	Margasari	72%	38%
4.	Kramat	64%	16%
5.	Pangkah	49%	40%
6.	Talang	37%	22%
7.	Bumijawa	41%	30%
8.	Balapulang	36%	26%
9.	Tarub	62%	55%
10.	Lebaksiu	61%	39%
11.	Dukuhwaru	33%	20%
12.	Dukuhturi	54%	31%
13.	Suradadi	29%	15%
14.	Warureja	59%	34%
15.	Bojong	37%	32%
16.	Jatinegara	39%	23%
17.	Pagerbarang	33%	16%
18.	Kedungbanteng	37%	29%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi jumlah APK di setiap kecamatan di Kabupaten Tegal, APK tertinggi terdapat di Kecamatan Adiwerna, dan APK terendah terdapat di Kecamatan Suradadi, yaitu 29% yang menurut Dinas P dan K jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Tegal yaitu sebesar 76%.

Dari hal tersebut penulis bermaksud mencari tahu dengan meneliti pada Kecamatan Suradadi, faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program

Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, dengan mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan tersebut, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan tersebut, maka manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Dinas Pendidikan, dapat memberikan informasi aktual mengenai kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi terhadap program wajib belajar 12 tahun agar dapat memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
- b. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai program wajib belajar 12 tahun dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan serta membuktikan teori dengan di lapangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan masukan tentang visi pendidikan sehingga dapat menyukseskan dan mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
- b. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat dalam mengikuti program wajib belajar 12 tahun.
- c. Bagi orangtua, penelitian ini dapat memberikan masukan agar mereka mengubah pandangannya tentang nilai anak dan visi pendidikan demi mensukseskan program wajib belajar 12 tahun.

1.5. Batasan Istilah

1.5.1. Pelaksanaan Wajib belajar 12 tahun

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah (Departemen Pendidikan Nasional;216). Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan penduduk di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal yang berusia 16-18 tahun yang telah lulus SMP namun tidak melanjutkan ke SMA atau yang tidak melaksanakan program wajib belajar 12 tahun sampai tuntas.

1.5.2. Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun

Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang dimaksud di Kecamatan Suradadi adalah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun pada anak usia 16-18 tahun untuk memperoleh pendidikan dan menamatkan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teoritis

2.1.1. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa, Sumber Daya Manusia bermutu yang merupakan produk pendidikan adalah merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:12)

Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan berlangsung terus menerus. Sebuah pendidikan akan selalu diarahkan pada sebuah tujuan yang dapat membawa sebuah fungsi yang memiliki manfaat.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh.

2.1.1.1 Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:98). Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal 14, jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Disamping jenjang pendidikan itu dapat diadakan pendidikan prasekolah, yang dapat merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

Pendidikan Dasar menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terbentuk dari sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lainnya yang sederajat.

Tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal 17, menyatakan pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah atas dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas

(SMA). Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan MAdrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Tercantum dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 19 menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

2.1.1.2 Pendidikan NonFormal

Tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 menyatakan bahwa pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan siap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang di tunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan NonFormal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:31).

2.1.1.3 Pendidikan InFormal

Kegiatan Pendidikan Informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (Departemen Pendidikan Nasional,

2010:30). Pendidikan informal dengan kata lain adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.

2.1.2. Pelaksanaan Wajib Belajar

Salah satu langkah untuk melakukan proses pendidikan adalah melalui pembelajaran. Melalui pembelajaran, kita dapat melaksanakan proses pendidikan secara sistematis dan terpantau sehingga dapat mengetahui secara pasti tingkat perubahan peserta didik. Proses pendidikan secara alamiah dirasa terlalu lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Sering terjadi permasalahan yang belum selesai, namun sudah muncul masalah berikutnya yang mendesak diselesaikan juga. Sudah pasti hal tersebut membuat kita merasa kesulitan. Maka dari itu, proses pendidikan harus dikelola secara baik dan benar agar sesuai dengan kebutuhan hidup. Sejak saat itu, proses pendidikan dilakukan secara sadar sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. dengan cara seperti itu maka kita dapat bertahan dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Padahal proses pendidikan yang dilakukan memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat.

Pelaksanaan wajib belajar menurut Vassiliou (2011, p. 9) *“In most countries, the start of compulsory education coincides with the start of primary education. Almost everywhere, children who have reached compulsory school age must be enrolled in an education institution”*. Artinya, sebagian negara menetapkan pendidikan wajib dimulai dengan pendidikan dasar. Hampir disetiap negara, anak-

anak yang telah mencapai usia wajib belajar harus terdaftar di institusi pendidikan formal, nonformal, atau informal dengan kata lain bagi anak-anak usia wajib belajar harus bersekolah.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pencanangan program wajib belajar, dengan tujuan untuk mempercepat proses pendidikan yang diselenggarakan. Program wajib belajar adalah program yang mewajibkan semua anak usia sekolah mengikuti proses belajarsesuai dengan tingkat usia. pada awalnya wajib belajar 6 tahun, artinya anak usia sekolah dasar harus bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa anak Indonesia minimal berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Berikutnya, program tersebut dikembangkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Artinya, anak usia Sekolah Menengah Pertama harus bersekolah sehingga anak Indonesia minimal berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama. Setelah program tersebut dianggap berhasil, selanjutnya program ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun artinya anak-anak usia Sekolah Menengah Atas harus bersekolah.

Wajib belajar merupakan kesempatan yang terbuka bagi semua orang. Anak-anak usia sekolah harus menjadi bagian dari program tersebut. Kita tidak membiarkan anak-anak usia sekolah berkeliaran pada saat jam-jam belajar, karena mereka seharusnya mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan program wajib belajar, sudah tidak ada alasan bagi setiap anak bangsa untuk tidak bersekolah. Maka, diharapkan terjadi peningkatan sumber daya manusia secara signifikan.

Program wajib belajar yang diadakan pemerintah ini merupakan kesempatan baik untuk peningkatan kualitas diri. Khususnya untuk masyarakat

miskin , program ini merupakan program yang memang dicanangkan untuk mereka. Akan menjadi kerugian jika program tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal, dan program wajib belajar ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah, dan sudah seharusnya kita memnfaatkan program ini karena berbagai pengetahuan dan ketrampilan dapat diperoleh, pengetahuan dan ketrampilan inilah yang menjadi bekal dalam melakukan perubahan pada hidup kita.

Menurut Yenny 2017, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun meliputi kecukupan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan pembiayaan pendidikan;

2.1.2.1 Kecukupan tenaga pendidik

Menurut Standar Nasional Pendidikan, pendidikan harus memiliki kualifikasi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/SMK, satuan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C dan tenaga pendidik pada lembaga kursus pelatihan.

Menjadi pendidik yang profesional haruslah memiliki kompetensi keahlian dasar sebagai tenaga pendidik. Sebagaimana dinyatakan dalam standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bahwa tenaga pendidik menurut PP No. 19/2005, Bab VI Pasal 28 tentang standarisasi tenaga pendidik adalah :

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- (2) Kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogic
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi professional, dan
 - d. Kompetensi social
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah / sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

2.1.2.2 Ketersediaan sarana dan prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, dan tempay lainnya guna menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2.1.2.3 Ketersediaan pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumberdaya tersedian digunakan untuk mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat beragam tergantung dari kondisi masing-masing

wilayah seperti kondisi geografis , tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

2.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Pembangunan manusia merupakan proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Badan Pusat Statistik (2018) menjelaskan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur pencapaian keseluruhan negara atau provinsi. IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial ekonomi di negara atau provinsi tertentu. IPM direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup yang layak (*standard of living*). indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat adalah angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli. (*purchasing power parity/PPP*)

Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi di Indonesia
(Periode 2013 sampai 2017)

No	Wilayah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Aceh	68.3	68.8	69.4	70	70.6
2	Sumatera Utara	68.3	68.8	69.5	70	70.5
3	Sumatera Barat	68.9	69.3	69.9	70.7	71.2
4	Riau	69.9	70.3	70.8	71.2	71.7
5	Jambi	67.7	68.2	68.8	69.6	69.9
6	Sumatera Selatan	66.1	66.7	67.4	68.2	68.8
7	Bengkulu	67.5	68	68.5	69.3	69.9
8	Lampung	65.7	66.4	66.9	67.65	68.2
9	Kep. Bangka Belitung	67.9	68.2	69	69.5	69.9
10	Kep. Riau	73	73.4	73.5	73.9	74.4
11	D.K.I Jakarta	78	78.3	78.9	79.6	80
12	Jawa Barat	68.2	68.8	69.5	70	70.6
13	Jawa Tengah	68	68.7	69.4	69.9	70.5
14	D I Yogyakarta	76.4	76.8	77.5	78.3	78.8
15	Jawa Timur	67.5	68.1	68.9	69.7	70.2
16	Banten	69.4	69.8	70.2	70.9	71.4
17	Bali	72	72.4	73.2	73.6	74.3
18	Nusa Tenggara Barat	63.7	64.3	65.1	65.8	66.5
19	Nusa Tenggara Timur	61.6	62.2	62.6	63.1	63.7
20	Kalimantan Barat	64.3	64.8	65.5	65.8	66.2
21	Kalimantan Tengah	67.4	67.7	68.5	69.1	69.7
22	Kalimantan Selatan	67.1	67.6	68.3	69	69.6
23	Kalimantan Timur	73.2	73.8	74.1	74.5	75.1
24	Kalimantan Utara	67.9	68.6	68.7	69.2	69.8
25	Sulawesi Utara	69.4	69.9	70.3	71	71.6
26	Sulawesi Tengah	65.7	66.4	66.7	67.4	68.1
27	Sulawesi Selatan	67.9	68.4	69.1	69.7	70.3
28	Sulawesi Tenggara	67.5	68	68.7	69.3	69.8
29	Gorontalo	64.7	65.1	65.8	66.2	67
30	Sulawesi Barat	61.5	62.2	62.9	63.6	64.3
31	Maluku	66	66.7	67	67.6	68.1
32	Maluku Utara	64.7	65.1	65.9	66.6	67.2
33	Papua Barat	60.9	61.2	61.7	62.2	62.9
34	Papua	56.2	56.7	57.2	58	59
	Indonesia	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81

Sumber : ipm.bps.go.id

Pada tabel diatas dapat diketahui jumlah IPM pada tiap provinsi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. IMP tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IMP 80 pada tahun 2017, dan IMP terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu 59. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi IMP suatu daerah. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, nilai IMP selalu bertambah pada setiap tahunnya. Ini menunjukkan kinerja pemerintah yang dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan data yang ada.

Indikator proses pendidikan menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diterapkan terjadi di masyarakat. Data yang diperlukan dalam mengetahui indikator proses pendidikan, antara lain: APK, APM, dan rata-rata lama sekolah.

2.1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut Kemdikbud, APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APK mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, tetapi indikator ini lebih banyak bercerita tentang keberhasilan sistem pendidikan dalam mendidik anak dan remaja, bukan pada penduduk dewasa. APK memberikan gambaran secara umum mengenai banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Rumus dalam menghitung APK:

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SMA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100 \%$$

2.1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Menurut Kemdikbud APM adalah perbandingan antara siswa sekolah usia tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dari APK karena pembilangnya lebih kecil. APM membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil karena menunda saat mulai sekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, dan lulus lebih awal. Rumus dalam menghitung APM:

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 yang sekolah di SMA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

2.1.4. Tujuan dan Target Wajib Belajar

Sudah pasti sasaran utama program Wajib Belajar 12 tahun yaitu masyarakat miskin. Untuk merealisasikan Wajib Belajar ini dilaksanakan, dimana beban biaya ditanggungkan seluruhnya kepada Pemerintah. Selain bertujuan meningkatkan

SDM, wajib belajar ini juga dimaksudkan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin.

Menurut Talman 2016, sejumlah target yang ingin dicapai pada 2019 melalui Wajib Belajar 12 Tahun adalah jumlah satuan pendidikan SMA di Indonesia sebanyak 14.311 sekolah dengan rasio 386 siswa per-sekolah. Sedangkan saat ini rasionya 361 siswa/sekolah dengan jumlah 12.329 SMA. Untuk guru, data 2014 menunjukkan jumlah guru SMA sebanyak 346.751 orang dengan rasio 14,5 siswa per guru. Target 2019 adalah sebanyak 358.459 guru dengan rasio 15,4 siswa/guru.

Untuk perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan saat ini sebanyak 9.750 unit dengan tingkat kepemilikan 79%. ditargetkan pada 2019 dari 14.311 sekolah yang ada, semuanya sudah memiliki perpustakaan atau menjadi 100%. sementara laboratorium kimia, saat ini hanya terdapat 5.451 unit atau 44% dari semua SMA yang tersebar di Indonesia, sehingga pada 2019 ditargetkan mencapai 100% kepemilikannya.

Sedangkan untuk laboratorium fisika, saat ini terdapat 5.970 atau 48% sehingga ditargetkan ditargetkan pada 2019 terdapat 12.879 SMA yang memilikinya atau naik menjadi 90%. Untuk laboratorium biologi saat ini dimiliki 7.621 SMA atau 50% dan ditargetkan menjadi 80%. Laboratorium komputer dimiliki 7.706 SMA atau 63% dan ditargetkan menjadi 100%. Dengan target-target ini, guna menyukseskan Wajib Belajar 12 Tahun.

2.1.5. Tantangan dalam Wajib Belajar

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan

Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Keluarga Produktif melalui program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Di sisi lain dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 secara jelas menerangkan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan yang telah dan akan dilakukan. Terungkap berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai Program Wajib Belajar 12 Tahun. Dimana dinyatakan bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun belumlah mencapai keadaan yang diinginkan.

Melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil serta peningkatan input pendidikan, Pemerintah sangat berkeinginan mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Namun jelas hal itu sulit tercapai apabila berbagai persoalan belum ditangani secara baik. Menurut Talman 2016, terdapat 5 persoalan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun:

1. Persoalan Regulasi dan Koordinasi Antar lembaga/Kementrian

Secara umum jika meneliti berbagai regulasi yang ada kesamaan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya belum terlaksana. Tampak bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun masih dalam proses persiapan, sebab aturan-aturan yang masih berlaku adalah berkaitan dengan Wajib belajar 9 Tahun, baik di tingkat UU maupun di tingkat Pemerintah (PP) atau peraturan Menteri (Permen). Ketidakpaduan ini menyebabkan ada regulasi yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang sebaliknya, yaitu menghambat Wajib Belajar 12 tahun.

2. Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Pemerintah Daerah

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antar wilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang dan ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, dengan adanya ketimpangan pembangunan membuat pemerataan pendidikan di Indonesia juga terganggu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pokok permasalahan yang harus segera diselesaikan guna tercapainya keselarasan pendidikan terutama infrastruktur sekolah yang menjadi syarat utama dalam mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun.

Dengan kondisi yang seperti ini, maka wajib belajar 12 tahun masih terhambat. Sementara yang masih berjalan saat ini adalah melanjutkan inisiatif kemendikbud periode sebelumnya yang mencanangkan PMU atau Pendidikan Menengah Universal, sebagai lanjutan dari wajib belajar 12 tahun. Jika wajib belajar diamanatkan oleh Undang-Undang, wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah, dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan ada sanksi bagi yang tidak mengikuti. PMU hanya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung penduduk usia sekolah, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikuti.

Jadi, jika ada yang melaksanakan Wajib belajar 12 tahun di beberapa kota/kabupaten sebagai inisiatif Pemerintah Daerah yang ditandai dengan

ditetapkannya Perda berkaitan dengan hal tersebut, namun jika ada Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan, maka tidak akan dikenai sanksi.

3. Program Wajib Belajar 9 Tahun yang Belum Tuntas

Di sisi lain program Wajib Belajar 12 Tahun juga masih terkendala dengan adanya fakta bahwa Program Wajib Belajar 9 tahun nyatanya belum tuntas hingga saat ini. Menurut Talman, disebutkan bahwa Wajib Belajar 9 tahun ini baru mencakup 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 511 kabupaten dan kota).

Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program Wajib Belajar 12 tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun kedepan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. berarti masih ada fokus pembangunan pendidikan terhadap peningkatan akses pendidikan dasar sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program Wajib Belajar 9 tahun, sebelum pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun secara penuh.

4. Sistem Kualitas Layanan Pendidikan

Pemerintah secara berkelanjutan berusaha mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi sarana pendidikan, pengembangan kurikulum, dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Berdasarkan referensi dari kemendikbud jumlah sekolah untuk SD/MI ada 174.205 sekolah, untuk SMP/MTS ada 56.686 sekolah, sedangkan untuk SMA/MA/SMK ada 35.660 sekolah. Laju penduduk di Indonesia sangat tinggi, hal

ini berarti setiap tahun anak yang masuk pendidikan dasar bertambah, dan yang meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya juga bertambah, oleh karena itu dalam rangka menuju program wajib belajar 12 tahun pemerintah harus melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan untuk sekolah menengah, supaya ketika program Wajib Belajar 12 Tahun diwajibkan dari segi infrastruktur sudah siap.

5. Kebijakan Keuangan untuk Wajib Belajar 12 Tahun

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang APBN 2017, definisi Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Dinyatakan juga presentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

Berdasarkan pasal 21 UU APBN 2017, perencanaan anggaran dalam bidang pendidikan dialokasikan sebesar: (1) anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 416.090.233.749.000,00 (empat ratus enam belas triliun sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh empat puluh sembilan ribu rupiah); (2) presentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 2.080.451.168.747.000,00 (dua kuadriliun delapan puluh triliun empat ratus lima

puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Jika rata-rata untuk biaya operasional sekolah setiap siswa sebesar Rp.1000.000 selama setahun, maka alokasi anggaran pendidikan setiap tahun untuk BOS sebagai konsekuensi khusus program wajib belajar 12 tahun akan mencapai lebih dari Rp25,5 Trilyun. Padahal anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak lebih dari 40 Trilyun. Oleh karena itu wajib belajar 12 tahun mengalami kendala utama pada anggaran, karena kebutuhan yang sangat besar dan untuk program yang lain.

2.1.6. Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar

Keberhasilan Program Wajib Belajar, menurut Nopembri (2007) dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam individu, faktor internal meliputi; kemampuan anak, minat sekolah, ekspektasi(harapan) anak, persepsi siswa tentang sekolah dan aspirasi/cita-cita anak. Faktor eksternal meliputi; kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, keutuhan keluarga, persepsi orangtua, dan ketersediaan sarana prasarana.

Penelitian Nopembri (2007) , mengidentifikasi bahwa faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah dapat disebabkan oleh:

1. Tingkat Pendidikan Orangtua

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Dengan tingkat pendidikan orangtua yang dimilikinya akan dapat

mengarahkan anak-anaknya didalam proses pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya kecenderungan orangtua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menganggap penting pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan memiliki minat yang lebih tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Nopembri, 2007)

2. Tingkat Pendapatan Orangtua

Pendapatan adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi (Nopembri, 1982:92). Pendapatan orangtua digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan keluarga, karena pendapatan orangtua merupakan sumber untuk memperoleh semua kebutuhan yang diinginkan termasuk kebutuhan pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan yang diterima penduduk digolongkan berdasarkan 4 golongan yaitu: (1) golongan penduduk berpendapatan rendah, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata <Rp.1.500.000 per bulan, (2) golongan penduduk berpendapatan sedang, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata antara Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 per bulan, (3) golongan penduduk berpendapatan tinggi, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000-Rp.3.500.000 per bulan, (4) golongan penduduk berpendapatan sangat tinggi, yaitu penduduk yang berpendapatan >Rp.3.500.000

3. Jumlah Tanggungan Orangtua

Semakin banyak jumlah tanggungan orangtua maka dana yang dibutuhkan akan semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini berdampak pada alokasi dana yang diberikan untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka, semakin banyak tanggungan dalam keluarga maka dana yang dialokasikan tidak dapat bermanfaat bagi masa depan anak.

Jumlah tanggungan keluarga dapat digolongkan menjadi empat (Sumardi dalam Gigih, 1985:133), yaitu:

- a. Tanggungan sebanyak 10 orang atau lebih dapat dikatakan sangat banyak
- b. Tanggungan sebanyak 7-9 orang dapat dikatakan banyak
- c. Tanggungan sebanyak 5-6 orang dapat dikatakan sedang
- d. Tanggungan sebanyak 1-4 orang dapat dikatakan sedikit

4. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan sosial adalah kehidupan manusia dan interaksinya dengan sesamanya (Nopembri, 2007) manusia tidak dapat hidup sendiri, sesuai kodratnya manusia memerlukan hidup bersama dan hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan secara umum tempat tinggal orangtua memacu dalam mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak mereka. Orangtua yang tinggal dalam masyarakat berpendidikan, akan mendorong untuk menyekolahkan anaknya, sebaliknya orangtua yang tinggal dalam masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah akan mempengaruhi pula untuk tidak menyekolahkan anaknya.

5. Faktor jarak dari Rumah ke Sekolah

Jarak menjadi objek utama dalam pembicaraan mengenai karakteristik suatu kawasan diatas permukaan bumi. Penggunaan jarak menjadikan para ahli geografi lebih memahami beberapa bagian menarik dari distribusi suatu kawasan, karakteristik vegetasi, tanah iklim, serta karakteristik masyarakat yang hidup di dalamnya apakah mampu beradaptasi atau bahkan mendominasi lingkungan mereka. Signifikansi biaya dan jarak ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada bagian ini, diantaranya adalah dalam mempelajari jalan, kualifikasi jarak geografi dapat dinyatakan juga dalam “biaya” dari jarak tersebut. Biaya dari jarak adalah refleksi dari topografi contoh penduduk dengan kemampuan ekonomi yang baik cenderung mencari lokasi tempat tinggal yang jauh dari pusat kota dan terletak pada zone biaya terjauh, aspek dari biaya jarak adalah waktu jarak. Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh lokasi relatif. Lokasi relatif suatu wilayah atau tempat yaitu kedudukan wilayah atau tempat yang bersangkutan dalam hubungan dengan faktor alam dan budaya yang ada disekitarnya. Lokasi menggambarkan keterjangkauan perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain (Nopembri, 2007)

Keterjangkauan yang rendah akan menyebabkan susahny suatu daerah mencapai kemajuan, sebaliknya semakin daerah itu mudah dijangkau maka semakin mudah daerah itu mengalami kemajuan. Hal ini berkaitan dengan jarak. Berkaitan dengan jarak semakin dekat jarak antar daerah berarti semakin mudah kontak terjadi (Bintarto 1979:16). dari sini dapat disimpulkan bahwa jarak yang jauh dari rumah akan sulit dicapai dan membutuhkan banyak biaya, dari pengertian tersebut jelas bahwa dengan jarak yang jauh antara rumah dan sekolah sangat mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekoah.

6. Fasilitas Jalan

Jalan merupakan prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang di peruntukan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Pengertian jalan tidak terbatas pada jalan pada permukaan tanah, akan tetapi termasuk jalan yang melintasi sungai besar/danau/laut, di bawah permukaan air dan di atas permukaan tanah.

Menurut perannya, jalan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu jalan arteri (yang melayani angkutan arteri), dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, jalan kolektor yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri: perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi, dan jalan lokal dengan ciri-ciri: kecepatan kendaraan $>20\text{km/jam}$, lebar jalan $>6\text{meter}$.

Fungsi jalan dibedakan menjadi : (1) Fungsi jalan primer kelas I atau lebih sering disebut dengan jalan propinsi karena berfungsi menghubungkan jalan antara kota-kota penting, atau menghubungkan pusat industri ke pelabuhan atau bandara, jalan digunakan untuk kendaraan yang berkecepatan tinggi yang bertonase besar. (2) Fungsi jalan sekunder kelas II merupakan jalan antara kota yang lebih kecil seperti Kecamatan, biasanya dilalui kendaraan yang berkecepatan sedang sampai tinggi, dengan bobot sedang. (3) Fungsi jalan penghubung kelas III atau kolektor merupakan jalan sejenis atau berlainan jenis (Ditjen Bina Marga 1976 dalam Nopembri 2007)

7. Fasilitas Transportasi

Hampir seluruh kehidupan manusia tidak terlepas dari keperluan akan pengangkutan. Pengangkutan diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan tumbuh dan berkembang sejalan dengan majunya tingkat kehidupan dan budaya manusia. Kehidupan masyarakat yang maju ditandai oleh mobilitas yang tinggi, yang dimungkinkan oleh tersedianya fasilitas pengangkutan yang cukup.

Transportasi berperan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan yang tinggi guna mendukung mobilitas manusia, barang, jasa. Mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fasilitas transportasi merupakan sektor yang sangat penting karena transportasi sebagai sarana seseorang untuk melakukan perjalanan keterkaitan dengan pendidikan anak bahwa tercukupinya sarana dan prasarana transportasi mempengaruhi anak untuk melanjutkan pendidikannya. Semakin banyak sarana dan prasarana, maka mempermudah anak untuk pergi ke sekolah, dengan demikian jelas bahwa sarana transportasi juga sangat berpengaruh dalam mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah.

Tabel. 2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Pengarang	Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Pendekatan	Pengumpulan Data	Hasil
1.	Nur Berlian VA	Faktor-faktor Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 1, Januari 2011)	Memperoleh informasi tentang daerah daerah yang paling rendah dalam pencapaian wajar dikdas, Mengkaji faktor-faktor yang terkait rendahnya pencapaian wajar dikdas, merumuskan alternatif upaya pemecahan masalah penuntasa wajar dikdas	Memperoleh bahan kebijakan tentang langkah-langkah dan strategi untuk memperkecil kesenjangan pencapaian wajar dikdas 9 tahun.	Kuantitatif	Kualitatif (pengamatan lapangan di beberapa daerah kasus)	Provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur pada umumnya memiliki masalah Wajar Dikdas dari segi tingginya persentase anak usia pendidikan dasar yang tidak sekolah, yaitu dimulai dari tingkat SD/MI, sedangkan di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) permasalahannya lebih banyak di tingkat SMP/Mts. Faktor-faktor penyebab di setiap daerah cukup bervariasi antara lain faktor kemiskinan penduduk, kesulitan menuju sekolah, kurangnya layanan pendidikan, rendahnya motivasi orangtua dan siswa terhadap pendidikan, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta faktor sosial budaya.
2.	Ferry Firmansyah	Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun di	Apa latar belakang pemerintah	Untuk menjelaskan latar belakang	Deskriptif historis (heuristik,	Kualitatif	Kualitas pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan melalui program wajib belajar 9 tahun dalam rangka

		Indonesia Periode 1994-2008 (e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 1, No 2, Mei 2013)	mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, bagaimana hasil pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sampai dengan ketuntasan berdasarkan pencapaian partisipasi anak sekolah. Metode penelitian melalui pendekatan deskriptif historis yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.	pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, untuk menganalisis hasil pelaksanaan wajib belajar 9 tahun berdasarkan partisipasi sekolah.	kritik sumber, interpretasi, historiografi)		menuju persaingan industrialisasi. Indikator pencapaian dapat dilihat melalui APK SD/MI mencapai 115,51% dan APK SMP/MTs mencapai 98,11% di tahun 2008 sehingga dinyatakan tuntas karena sesuai dengan kriteria Tuntas Paripurna.
3.	Sitta Aulia	Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang	Bagaimana dukungan pemerintah kota Surabaya	Memperoleh informasi tentang dukungan	Deskriptif kualitatif	Studi dokumentasi, observasi,	Dukungan pemerintah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) mulai pendidikan dasar

		Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan) (Jurnal Politik Muda, Vol 2 No 1, Januari-Maret 2012, hal 204-216)	dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, bagaimana dampak dukungan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah kota Surabaya terhadap pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah.	pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dan mengkaji dampak dukungan pemerintah kota Surabaya berupa program kebijakan yang dijalankan di tingkat sekolah.		dan wawancara	hingga pendidikan menengah negeri dan Hibah BOPDA pada sekolah swasta, pelaksanaan program BOPDA berdampak positif pada peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya dan berdampak adanya quota bagi masyarakat luar kota Surabaya, dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada manajemen pelaksanaan ditingkat sekolah, antara lain; kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta partisipasi orangtua.
4.	Yenny Merinatul Hasanah	Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta (Jurnal Akuntabilitas Manajemen	Untuk mengetahui pelaksanaan program, pencapaian tujuan program, hambatan-hambatan pelaksanaan	Pelaksanaan program, pencapaian tujuan program, hambatan-hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12	Kualitatif	Discrepancy evaluation program	Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun; kecukupan tenaga pendidik belum terpenuhi pada jenjang SD, ketersediaan sarana prasarana belum terpenuhi keseluruhan, ketersediaan pembiayaan pendidikan sudah terpenuhi. Pencapaian tujuan program wajib belajar; meningkatkan APS,

		Pendidikan, Vol 5, No 2, September 2017 halaman 228-239)	program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta.	tahun di Kota Yogyakarta.			mengurangi APS, meningkatkan AM, Hambatan-hambatan; rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, rendahnya minat anak dan kesadaran orangtua thd pentingnya pendidikan untuk masa depan, sosialisasi program wajib belajar kurang maksimal.
5.	Tety Nur Cholifah	Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan Orangtua dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Kelas IV SDN Kecamatan Sananwetan Kota Blitas (Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 1	Mengetahui pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orangtua terhadap hasil belajar siswa, pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa, pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orangtua dan gaya belajar	Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan orangtua terhadap hasil belajar siswa SDN kelas IV, adakah pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa SDN kelas IV, dan adakah pengaruh pendidikan	Dokumentasi dan kuesioner	Teknik deskriptif kualitatif	Ada pengaruh positif dan signifikan antara latar belakang tingkat pendidikan orangtua terhadap hasil belajar siswa, ada pengaruh positif dan signifikan antara gaya belajar terhadap hasil belajar siswa, ada pengaruh dan signifikan antara latar belakang tingkat pendidikan orangtua dan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa.

		Nomor 3 Bulan Maret Tahun 2016, Halaman 486- 491)	terhadap hasil belajar siswa	orangtua dan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa SDN Kelas IV Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.			
--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

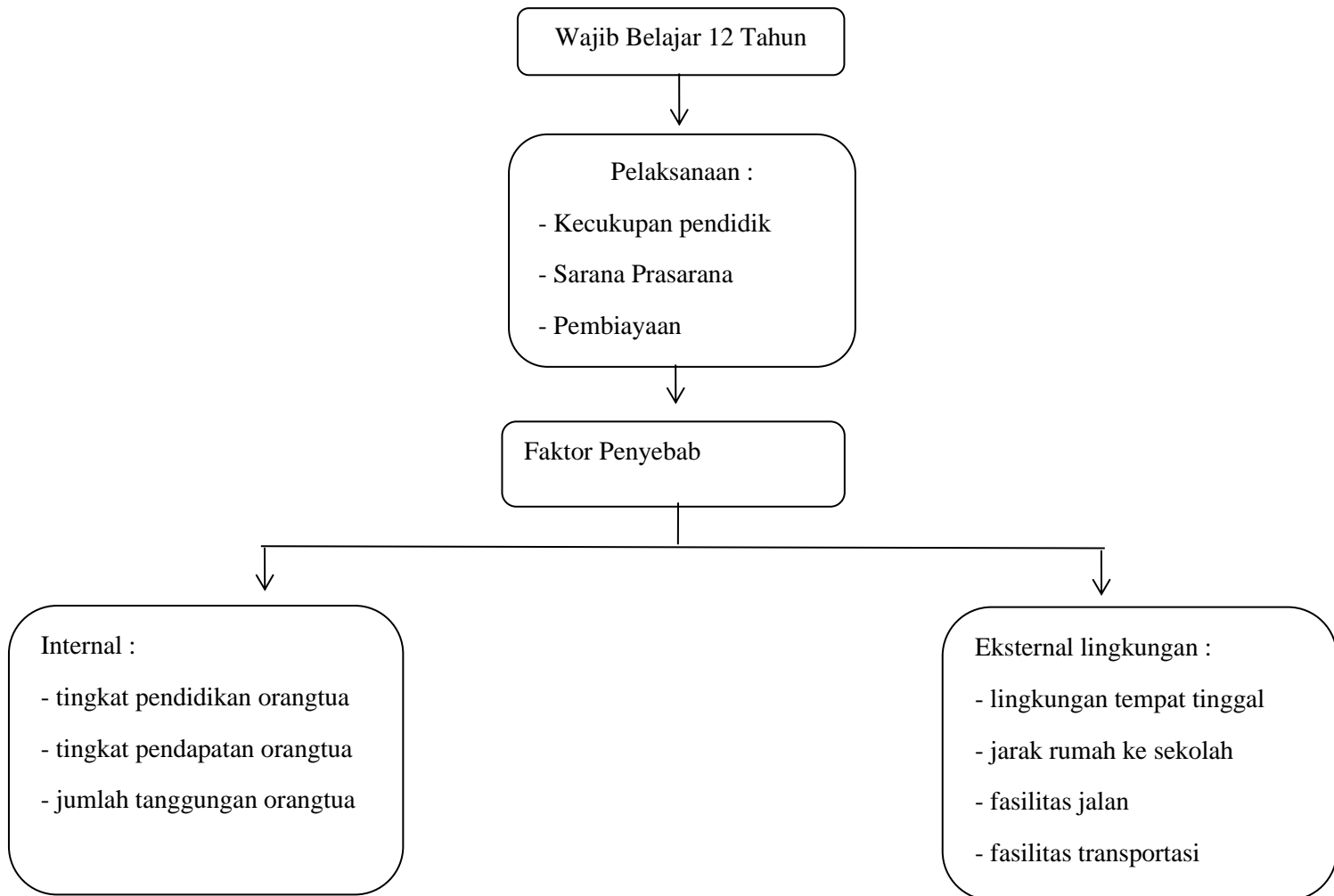
2.2. Kerangka Berfikir

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan manusia, karena pendidikan memegang peranan dalam pembangunan bangsa dan negara, pendidikan yang diberikan saat ini akan berdampak pada kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa yang akan datang. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam pembentukan kualitas diri manusia yang memiliki daya saing dan kemampuan menyerap teknologi yang akan mampu meningkatkan produktivitas. Kondisi pendidikan suatu bangsa mencerminkan kualitas sumber daya yang mendukung percepatan pembangunan pada bangsa itu sendiri. .

Pemerintah Kabupaten Tegal menargetkan APK SMA sebesar 76%. APK di suatu wilayah apabila $<76\%$ maka dapat dikategorikan tidak sesuai dengan target pemerintah, namun apabila $>76\%$ dapat dikategorikan sesuai dengan target pemerintah. Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, Kecamatan Suradadi pada tahun 2018 menunjukkan tingkat APK SMA sebesar 29%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat APK di Kecamatan Suradadi tidak sesuai dengan target pemerintah. Selain itu, pada data APK dan APM menunjukkan masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan program wajib belajar 12 tahun. Namun, ada kalanya terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Anak yang tidak sekolah pada suatu wilayah dapat dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi antara lain; faktor sosial dan fisik lingkungan..

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal menghadapi suatu masalah. Oleh karenanya, perlu diadakan upaya untuk mempermudah proses jalannya penelitian maka disusun alur penelitian yang

digunakan untuk pedoman penelitian. Secara skematis alur penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Kerangka berfikir penelitian dengan judul Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2013:173). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua dari anak usia 16-18 Tahun yang tidak mengikuti Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi, yang terdiri dari:

Tabel 3.1 Jumlah orangtua yang memiliki anak usia 16-18 tahun lulusan SMP yang tidak melanjutkan program Wajib Belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Desa /Kelurahan	Sampel (orang)
1	Karangwuluh	38
2	Gembongdadi	81
3	Karangmulya	61
4	Harjasari	138
5	Kertasari	96
6	Jatimulya	126
7	Jatibogor	114
8	Sidoharjo	93
9	Purwahamba	123
10	Suradadi	212
11	Bojongsana	58
	Jumlah	1.140

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2018

3.2. Sampel dan Teknik Sampling

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2013:174). Dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Sampling Non Probability Sampling*, yang mana sampel yang diambil adalah penduduk desa yang berada di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Responden

dalam penelitian ini adalah orangtua dari anak usia 16-18 tahun yang telah lulus SMP pada 2018 namun tidak melanjutkan atau tidak mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan taraf kesalahan 10% (Prasetyo, 2007:137). Rumus yang akan digunakan sebagai berikut :

$$n = N / 1 + Ne^2$$

Keterangan :

n = ukuran sample

N = ukuran populasi

e = taraf kesalahan (error) sebesar 0,10 (10%)

Jumlah sample (n) dalam penelitian ini yang dihitung menggunakan rumus *Slovin* adalah:

$$n = N / 1 + Ne^2$$

$$n = 1140 / 1 + Ne^2$$

$$n = 1140 / 1 + 11,40$$

$$n = 1140 / 11,40 = 56,8 \text{ yang dibulatkan menjadi } 57 \text{ sampel.}$$

Untuk menentukan persebaran jumlah sampel pada tiap desa, maka menggunakan teknik *Proportional Random Sampling* yaitu cara pengambilan sampel dilakukan secara acak dari seluruh populasi yang ada. Dengan perhitungan sebagai berikut : Populasi Desa / Jumlah Populasi x Jumlah Sampel.

Tabel 3.2 Perhitungan Persebaran Sampel

No	Desa /Kelurahan	Sampel
1	Karangwuluh	2
2	Gembongdadi	4
3	Karangmulya	3
4	Harjasari	7
5	Kertasari	5
6	Jatimulya	6
7	Jatibogor	5
8	Sidoharjo	5
9	Purwahamba	6
10	Suradadi	11
11	Bojongsana	3
	Jumlah	57

3.3. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2013:161). Variabel yang diteliti harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel sebagai berikut :

3.3.1 Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan indikator:

3.3.1.1 Kecukupan pendidik

3.3.1.2 Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

3.3.1.3 Ketersediaan pembiayaan

3.3.2 Hambatan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun , dengan indikator:

3.3.2.1 Tingkat pendidikan orangtua

3.3.2.2 Tingkat pendapatan orangtua

3.3.2.3 Jumlah tanggungan orangtua

3.3.2.4 Faktor Lingkungan tempat tinggal

3.3.2.5 Faktor Jarak dari rumah ke sekolah

3.3.2.6 Fasilitas Jalan

3.3.2.7 Fasilitas Transportasi

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan metode apapun, pengumpul data haruslah dilatih terlebih dahulu agar diperoleh data yang sesuai dengan harapan, dan metode-metode tersebut dilaksanakan secara objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan pengamat. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang terpenting dalam penelitian, karena data yang diperoleh akan bermanfaat dalam penyajian hipotesis yang telah dirumuskan. Setelah peneliti menentukan setepat-tepatnya untuk memperoleh data, kemudian disusul dengan cara-cara menyusun alat pembantunya yaitu instrumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2013:272). Dalam menggunakan teknik ini alat yang paling efektif adalah melengkapinya dengan pedoman, format, atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Observasi dilakukan untuk mengetahui kenyataan yang terdapat di lapangan mengenai keadaan geografis wilayah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

3.4.2 Kuesioner atau Angket

Teknik angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2013:268). Dalam teknik kuesioner atau angket, harus dilalui berbagai prosedur seperti merumuskan tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sebagai sasaran, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisis datanya nanti, serta merumuskan skala penilaian terhadap kuesioner atau angket tersebut. Angket berupa pilihan ganda yang sudah disediakan jawaban. Angket merupakan pernyataan tertutup mengenai data/informasi hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2013:274). Dibandingkan dengan teknik lainnya, dokumentasi agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan dokumentasi, yang diamati tidak hanya benda hidup saja, tetapi benda mati juga. Alat yang digunakan biasanya berupa pedoman dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, dan instansi lain yang memiliki data yang relevan.

3.4.4 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur (Arikunto, 2013). Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal mengenai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Metode wawancara dapat dilakukan untuk melengkapi metode angket, jika responden tidak dapat menjawab angket secara langsung. Pedoman yang digunakan ketika wawancara adalah pertanyaan pada angket responden.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh. Gambaran umum dapat menjadi acuan dari karakteristik data yang diperoleh. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis yang diperoleh wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal mengenai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, dan lingkungan tempat tinggal maupun karakteristik keluarga anak yang tidak sekolah.

3.5.2 Statistik Deskriptif SPSS

Analisis data ini digunakan untuk menganalisis dan mengolah data yang berasal dari angket kuesioner, menggunakan aplikasi imb statistic 24, kemudian diolah menggunakan teknik crosstab atau tabulasi silang Setelah diketahui hasilnya kemudian dimasukkan kedalam kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Klasifikasi
1.	Rendah	$X < M - 1SD$
2.	Sedang	$M - 1SD \leq X < M + 1SD$
3.	Tinggi	$M + 1SD \leq X$

Keterangan:

M : Mean

SD : Standart deviasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

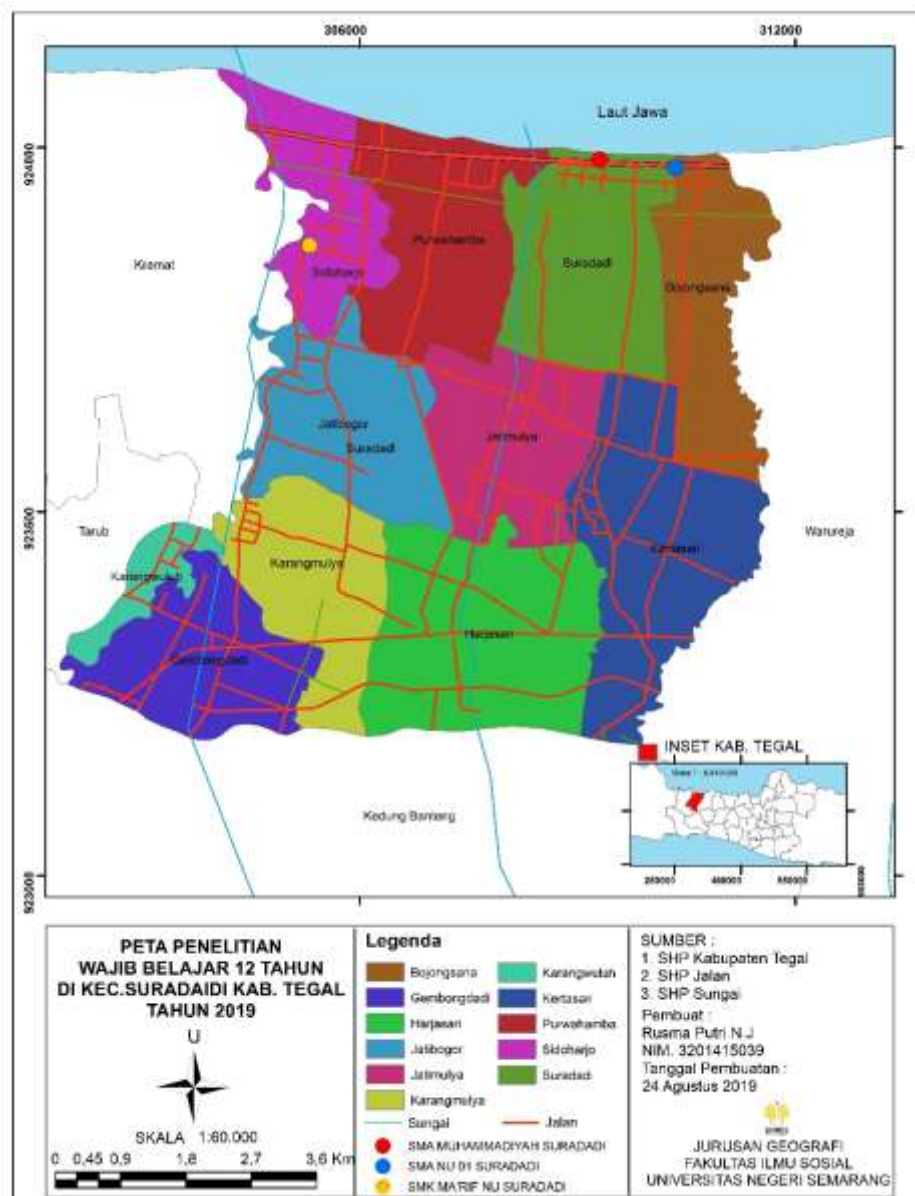
4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kondisi umum daerah penelitian ini dideskripsikan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan penelitian dan objek penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kecamatan Suradadi merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tegal. Kecamatan Suradadi memiliki wilayah yang terbentang dari pesisir utara sampai ke daratan. Jarak terjauh antar desa terlintas 14 km dari desa Bojongsana sampai dua desa di sebelah selatan yakni Harjasari dan Kertasari. Luas Kecamatan Suradadi adalah 5.573 hektar terdiri dari 79,68 % merupakan lahan sawah yaitu seluas 4.440,9 hektar.

Kecamatan Suradadi memiliki suhu udara berkisar 25-36⁰ celcius, ketinggian desa-desa di Kecamatan Suradadi merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-16 m dari atas permukaan laut. Terdapat empat desa yang merupakan desa pesisir yakni desa Sidaharja, Purwahamba, Suradadi, dan Bojongsana yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa.

Berdasarkan letak astronomis, Kecamatan Suradadi berada pada 6°51'46.11"LS - 6°56'46.14"LS dan 109°12'22.24"BT - 109°17'47.85"BT . Selain berdasarkan letak astronomisnya, Kecamatan Suradadi memiliki letak geografis sebagai berikut

- Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kedungbanteng
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kramat dan Tarub
- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Warureja



Gambar 4.1. Peta Lokasi Penelitian Tahun 2019

Kecamatan Suradadi merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tegal dengan memiliki jumlah perdukuan, RT dan RW yang berbeda antara desa yang satu dengan lainnya. Kecamatan Suradadi memiliki 33 perdukuan, 399 RT, dan 98 RW. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Banyaknya perdukuan RT dan RW menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Suradadi Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Perdukuan	RT	RW
1.	Karangwuluh	2	18	4
2.	Gembongdadi	4	34	4
3.	Karangmulya	2	36	8
4.	Harjasari	4	48	7
5.	Kertasari	5	49	8
6.	Jatimulya	4	43	8
7.	Jatibogor	3	55	16
8.	Sidoharjo	2	26	10
9.	Purwahamba	3	28	11
10.	Suradadi	2	47	17
11.	Bojongsana	2	15	5
	Jumlah	33	399	98

Sumber : Kecamatan Suradadi dalam Angka 2018

Kondisi penggunaan lahan di Kecamatan Suradadi berdasarkan luas lahan bukan sawah maupun lahan sawah dapat dilihat pada tabel 4.1 . Luas penggunaan lahan di Kecamatan Suradadi pada tahun 2018 paling banyak digunakan untuk lahan sawah yaitu 4,440.9 ha , sedangkan 1,132.1 digunakan untuk lahan bukan sawah. Penggunaan lahan sawah paling banyak terdapat di Desa Kertasari yaitu 597.9 ha, sedangkan penggunaan lahan bukan sawah paling banyak terdapat di Desa Sidoharjo yaitu 204.6 ha.

Tabel 4.2. Luas Penggunaan Lahan menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Suradadi, 2018

No	Desa/Kelurahan	Lahan Sawah (ha)	Bukan lahan sawah (ha)	Jumlah (ha)
1.	Karangwuluh	183.9	59.4	243.3
2.	Gembongdadi	365.3	99.7	465.0
3.	Karangmulya	373.6	56.8	430.4
4.	Harjasari	529.1	101.0	630.1
5.	Kertasari	597.9	103.2	701.1
6.	Jatimulya	456.0	108.2	564.2
7.	Jatibogor	440.0	95.0	535.0
8.	Sidoharjo	232.7	204.6	437.3
9.	Purwahamba	364.2	138.6	502.8
10.	Suradadi	511.0	113.0	624.0
11	Bojongsana	387.2	52.6	439.8
	Jumlah	4,440.9	1,132.1	5,573.0

Sumber ; Kecamatan Suradadi dalam angka 2018

Desa yang memiliki lahan sawah paling luas di Kecamatan Suradadi pada tahun 2018 adalah Desa Kertasari yaitu 597.9 ha, sedangkan Desa Karangwuluh merupakan desa yang memiliki lahan sawah paling sempit yaitu 183.9 ha. Luas kecamatan Suradadi adalah 5.573 ha terdiri dari 79,68% merupakan lahan sawah yaitu seluas 4.440,9 ha.

Dari luas lahan sawah tersebut 4.245 ha diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi teknis dan 15 ha lainnya merupakan sawah tadah hujan. Lahan sawah yang ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun seluas 30 ha, sedangkan 4.212 ha lainnya ditanami padi sebanyak dua kali setahun. Sedangkan lahan kering terdiri dari 854,5 ha merupakan bangunan dan pekarangan, dan 97,7 ha digunakan untuk kawasan lainnya, seperti makam, lapangan, jalan, dan sebgainya.

4.1.2. Kondisi Penduduk Daerah Penelitian

Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang oleh informasi mengenai data demografis suatu wilayah. Data mengenai jumlah penduduk, persebaran dan susunan penduduk menurut berbagai kelompok umur yang sesuai dengan perencanaan akan membantu dalam keberhasilan dalam kebijakan pembangunan yang akan diambil.

4.1.2.1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Suradadi Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
1.	Karangwuluh	1.987	2.082	4.069	95,44
2.	Gembongdadi	4.392	4.607	8.999	95,33
3.	Karangmulya	3.576	3.396	6.972	105,30
4.	Harjasari	6.661	6.299	12.960	105,75
5.	Kertasari	7.112	7.024	14.136	101,25
6.	Jatimulya	6.237	6.058	12.295	102,95
7.	Jatibogor	7.150	6.888	14.038	103,80
8.	Sidoharjo	4.479	4.569	9.048	98,03
9.	Purwahamba	4.051	4.006	8.057	101,12
10.	Suradadi	6.132	7.109	13.241	86,26
11.	Bojongsana	2.444	2.313	4.757	105,66
	Jumlah	54.221	54.351	108.572	99,76

Sumber ; Kecamatan Suradadi dalam angka 2018

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Suradadi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.3. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Suradadi pada tahun 2018 adalah 108.572. Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Suradadi adalah 54.221, dan jumlah penduduk perempuan adalah 54.351. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Desa Kertasari yaitu 14.136, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Karanguluh, yaitu 4.069.

4.1.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk merupakan penggolongan penduduk menurut ciri-ciri tertentu. Data mengenai komposisi penduduk dapat diketahui ciri penduduk, seperti penduduk menurut kelompok umur. Distribusi penduduk menurut kelompok umur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penduduk yang produktif. Tabel 10 menjelaskan komposisi penduduk Kecamatan Suradadi tahun 2018 menurut kelompok umur.

Tabel 4.4. Komposisi Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Kelompok Umur di Kecamatan Suradadi Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Kelompok Umur			Jumlah
		0-14	15-64	65+	
1.	Karangwuluh	800	1.255	213	2,237
2.	Gembongdadi	1.717	3.646	461	5,809
3.	Karangmulya	1.337	2.880	341	4,547
4.	Harjasari	2.573	6.516	597	10,010
5.	Kertasari	2.748	5.977	653	9,325
6.	Jatimulya	2.361	6.041	436	8,772
7.	Jatibogor	2.834	5.816	698	9,214
8.	Sidoharjo	1.991	4.723	370	7,248
9.	Purwahamba	2.033	5.003	244	7,715
10.	Suradadi	3.476	8.841	630	12,938
11	Bojongsana	902	2.271	172	3,345
	Jumlah	15.330	65.961	18.251	81,290

Sumber ; Kecamatan Suradadi dalam angka 2018

Jumlah penduduk di Kecamatan Suradadi pada tahun 2018 adalah 81,290 jiwa. Jumlah penduduk paling padat terdapat di Desa Suradadi yaitu 12,938 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Karangwuluh yaitu 2,237 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Suradadi dilihat dari kelompok umur paling banyak adalah penduduk pada kelompok umur 15-64 tahun yaitu sebesar 65.961 jiwa. Hal ini menandakan bahwa di Kecamatan Suradadi memiliki jumlah penduduk usia produktif yang tinggi.

Tabel 4.5. Banyaknya Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Suradadi tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Banyaknya		Rata-rata Anggota Rumah Tangga
		Penduduk	Kepala Keluarga	
1.	Karangwuluh	4.069	1.127	4
2.	Gembongdadi	8.999	3.042	3
3.	Karangmulya	6.972	1.766	4
4.	Harjasari	12.960	4.035	3
5.	Kertasari	14.136	3.972	4
6.	Jatimulya	12.295	3.534	3
7.	Jatibogor	14.038	3.889	4
8.	Sidoharjo	9.048	2.585	4
9.	Purwahamba	8.057	2.062	4
10.	Suradadi	13.241	3.264	4
11	Bojongsana	4.757	1.331	4
	Jumlah	108.572	30.607	4

Sumber ; Kecamatan Suradadi dalam angka 2018

Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Suradadi tahun 2018 adalah 30.607 Kepala Keluarga (KK), sedangkan umlah penduduknya 108.572 jiwa. Hal ini berarti bahwa setiap Kepala Keluarga memiliki anggota keluarga sebanyak 3,54 artinya besarnya jumlah anggota keluarga di Kecamatan Suradadi rata-rata 4 jiwa tiap keluarga. Jumlah Kepala Keluarga paling banyak terdapat di Desa Harjasari yaitu 4.035, sedangkan jumlah Kepala Keluarga paling sedikit terdapat di Desa Karangwuluh yaitu 1.127.

Tingkat jumlah anggota keluarga, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga, begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Tabel. 4.6. Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Suradadi Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1.	Karangwuluh	2,43	4.069	1.674,49
2.	Gembongdadi	4,65	8.999	1.935,27
3.	Karangmulya	4,30	6.972	1.621,40
4.	Harjasari	6,30	12.960	2.057,14
5.	Kertasari	7,01	14.136	2.016,55
6.	Jatimulya	5,64	12.295	2.179,96
7.	Jatibogor	5,35	14.038	2.623,93
8.	Sidoharjo	4,37	9.048	2.070,48
9.	Purwahamba	5,03	8.057	1.601,79
10.	Suradadi	6,24	13.241	2.121,96
11	Bojongsana	4,40	4.757	1.081,14
	Jumlah	55,72	108.572	1.948,53

Sumber ; Kecamatan Suradadi dalam angka 2018

Luas wilayah Kecamatan Suradadi tahun 2018 adalah 55,72 ha dan jumlah penduduknya sekitar 108.572 jiwa, sehingga kepadatan penduduk pada saat penelitian adalah 1.948,53 jiwa/km² atau 1.948 jiwa/km². Kepadatan penduduk tersebut artinya setiap 1 km² luas wilayah di Kecamatan Suradadi tahun 2018 terdapat 1.948 jiwa penduduk. Desa Jatibogor memiliki kepadatan tertinggi yaitu 2.623,93 jiwa/km². Berbeda dengan Desa Bojongsana yang memiliki tingkat kepadatan paling sedikit yaitu 1.081,14 jiwa/km².

Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, karena kepadatan penduduk yang tinggi akan banyak menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah kependudukan misal kemiskinan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

4.1.2.5 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel. 4.7 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Suradadi

No	Desa/Kelurahan	Mata Pencaharian				
		Petani	Jasa Perorangan	Industri	Pedagang	Transportasi
1.	Karangwuluh	316	39	26	123	27
2.	Gembongdadi	1,274	183	50	351	301
3.	Karangmulya	1,043	46	75	368	158
4.	Harjasari	2,843	183	204	451	146
5.	Kertasari	1,866	250	78	564	191
6.	Jatimulya	2,253	1,458	84	501	63
7.	Jatibogor	1,364	304	334	768	378
8.	Sidoharjo	1,856	482	327	512	104
9.	Purwahamba	2,758	368	226	524	68
10.	Suradadi	2,491	254	128	1,385	184
11	Bojongsana	722	245	84	284	67
	Jumlah	18,786	3,827	1,616	5,831	1,687

Sumber ; Kecamatan Suradadi dalam angka 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui informasi mengenai data Penduduk di Kecamatan Suradadi pada tahun 2018 bekerja dibidang pertanian, jasa perorangan, industri, pedagang, dan transportasi. Mayoritas bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 18,786 jiwa. Penduduk di Kecamatan Suradadi 3,827 jiwa bekerja di jasa perorangan, , 1,616 jiwa bekerja di industri, 5,831 jiwa bekerja sebagai pedagang, 1,687 jiwa bekerja di transportasi.

4.2 Hasil Penelitian

Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun merupakan suatu gerakan nasional yang dilakukan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan minimum yang berlaku

untuk semua warga negara tanpa kecuali. Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar diselenggarakan dengan memberikan pendidikan, meliputi penumbuhan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan watak dan kepribadian, serta pemberian pengetahuan dan ketrampilan dasar. Pendidikan dasar juga berusaha memberikan kesanggupan pada peserta didik bagi perkembangan hidupnya, baik untuk pribadi maupun masyarakat, oleh karena itu setiap warga negara harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar.

Penanggung jawab dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun adalah Kepala Dinas Kabupaten Tegal dan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tegal. Pelaksanaan sebuah kebijakan perlu dilakukan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang akan dilakukan kepada pelaksana kebijakan agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga saat pelaksanaan tidak menimbulkan permasalahan. Dalam upaya mendukung program pemerintah tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui berjalan atau tidaknya program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi maka diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat terutama dukungan orangtua dalam menyekolahkan anaknya yang berumur 16-18 tahun.

4.2.1. Tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tegal

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada satu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Target kriteria penentuan Wajar Dikdas berdasarkan APK yaitu persentase perbandingan antara jumlah keseluruhan penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. APM yaitu persentase perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah di sekolah pada suatu daerah dengan usia sekolah jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut.

APK dan APM setiap daerah berbeda-beda tergantung dari karakteristik dari kondisi wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 menargetkan tingkat SMA mencapai APK 76%.

Tabel. 4.8 Data APK/APM Siswa SMA/MA di Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Kecamatan	APK	APM
		SMA/MA	SMA/MA
1.	Adiwerna	114%	122%
2.	Slawi	99,6%	64%
3.	Margasari	72%	38%
4.	Kramat	64%	16%
5.	Pangkajene	49%	40%
6.	Talang	37%	22%
7.	Bumijawa	41%	30%
8.	Balapulang	36%	26%
9.	Tarub	62%	55%
10.	Lebaksumi	61%	39%
11.	Dukuhwaru	33%	20%
12.	Dukuhturi	54%	31%
13.	Suradadi	29%	15%
14.	Warureja	59%	34%
15.	Bojong	37%	32%
16.	Jatinegara	39%	23%
17.	Pagerbarang	33%	16%
18.	Kedungbanteng	37%	29%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal 2018

Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan yang tersebar dalam berbagai wilayah. Tabel 4.8 menunjukkan data APK dan APM siswa SMA/MA Kabupaten Tegal tahun 2018. Tingkat APK dan APM paling tinggi terdapat di Kecamatan

Adiwarna, sedangkan tingkat APK dan APM paling rendah adalah Kecamatan Suradadi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengungkapkan bahwa Kecamatan Lebaksiu dan Kecamatan Talang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tegal yang setiap tahun mengalami angka APK APM naik turun. Kecamatan Suradadi setiap tahun berada pada posisi paling rendah apabila dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di Kabupaten Tegal.

Tabel 4.8 Tingkat APK dan APM pada Jenjang SD, SMP, SMA di Indonesia, Jawa Tengah, Kabupaten Tegal dan Kecamatan Suradadi tahun 2016-2018.

Tahun	Lokasi	APK (%)			APM(%)		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
2016	Indonesia	109,20	89,98	80,44	96,71	77,89	59,85
	Jateng	111,01	91,01	79,01	97,91	79,97	58,04
	Kab. Tegal	110,55	85,99	80,43	80,61	74,97	43,72
	Suradadi	107,01	54,89	27,42	63,71	44,07	13,67
2017	Indonesia	108,43	90,00	82,25	97,14	78,30	60,19
	Jateng	112,43	87,70	61,07	96,03	81,04	59,01
	Kab. Tegal	109,41	86,61	41,69	88,24	85,24	42,12
	Suradadi	107,41	56,21	28,04	87,01	65,71	14,39
2018	Indonesia	108,48	91,23	80,11	97,48	78,75	60,53
	Jateng	113,09	89,43	63,71	95,11	87,07	59,43
	Kab. Tegal	109,55	72,31	45,03	87,13	76,54	42,34
	Suradadi	107,86	63,91	29,00	89,11	65,91	15,00

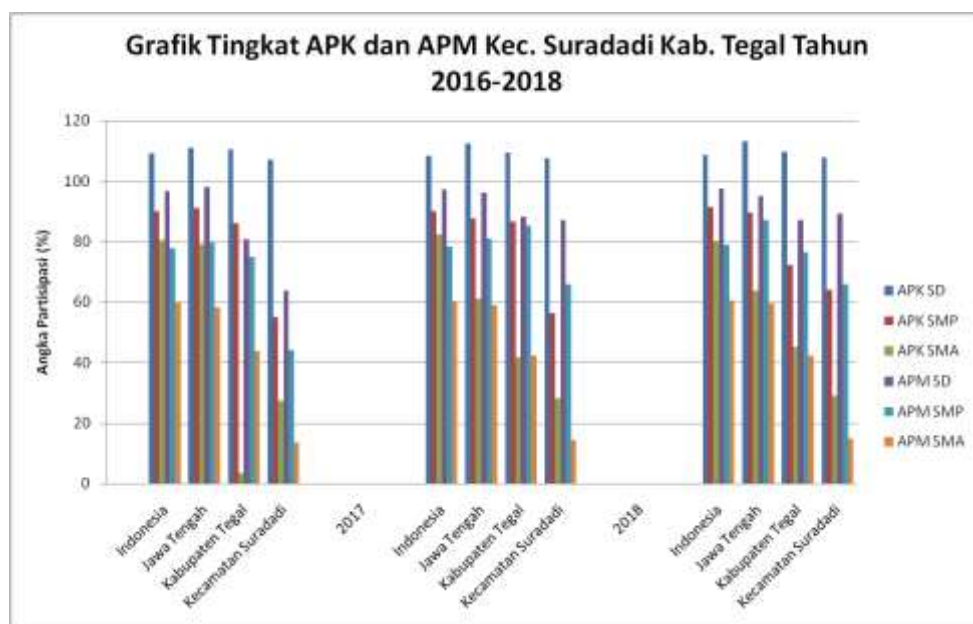
Sumber : BPS- Republik Indonesia Survey Sensus Nasional (BPS-RI SUSENAS)

Indikator yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk mengukur ketercapaian Program wajib Belajar 12 Tahun adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK). Tingkat ketuntasan daerah dalam melaksanakan program Wajib Belajar dikategorikan: a) Tuntas Pratama, bila APK mencapai 80% s.d 84%; b) Tuntas Madya, bila APK mencapai 85% s.d 89%; c) Tuntas Utama, bila APK mencapai 90% s.d 94%; d) Tuntas Paripurna, bila APK mencapai minimal 95%.

Tingkat APK di Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan tuntas utama yaitu telah mencapai >95% pada jenjang SD. Tidak setiap tahun tingkat APK mengalami kenaikan. Perbandingan tingkat penca[ai]an APK dan APM di Indonesia dan Jawa Tengah tidak terlalu jauh. Tingkat APK dan APM di Jawa Tengah selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

Gambar 4.2. Grafik tingkat APK dan APM di Kecamatan Suradadi Kab Tegal Tahun 2016-2018.

4.2.2 Perbandingan antara Jumlah Penduduk usia 7- 12 Tahun yang Sekolah dan Tidak Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal



Tabel 4.9. Perbandingan Antara Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang Sekolah dan Tidak Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2018.

No	Desa/Kelurahan	Sekolah	Tidak Sekolah	Jumlah
1.	Karangwuluh	54	64	118

2.	Gembongdadi	192	135	327
3.	Karangmulya	114	102	216
4.	Harjasari	336	230	566
5.	Kertasari	236	161	397
6.	Jatimulya	313	210	523
7.	Jatibogor	259	190	449
8.	Sidoharjo	201	156	357
9.	Purwahamba	237	205	442
10.	Suradadi	404	354	758
11	Bojongsana	107	97	199

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Tegal 2018

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi perlu diketahui jumlah penduduk usia 16-18 tahun baik yang masih sekolah ataupun yang tidak sekolah. Tabel 15 menunjukan jumlah penduduk tersebut.

Pada tabel 4.9 menunjukan bahwa masih ada penduduk usia 16-18 tahun yang tidak sekolah. Hal tersebut menunjukan bahwa masih ada penduduk yang belum melaksanakan program pembangunan pemerintah yaitu belum melaksanakan Program Wajib Belajar 12 Tahun.

4.2.3. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

Banyaknya sekolah pada suatu daerah dapat membawa pengaruh terhadap kondisi anak untuk sekolah. Selain itu, aksesibilitas yang memadai juga membawa pengaruh bagi anak untuk sekolah, semakin dekat jarak yang ditempuh maka akan memberikan dorongan kepada anak untuk berangkat sekolah. Keberadaan sekolah yang terdapat di Kecamatan Suradadi dapat dianalisis sebagai berikut.

A. Desa Karangwuluh

Desa Karangwuluh terletak di sebelah selatan Kecamatan Suradadi, berbatasan langsung dengan Desa Karangmulya dan Desa Gembongdadi. Desa ini memiliki 2 SD dengan jumlah siswa sebanyak 319, adanya sarana pendidikan

tersebut diharapkan anak usia sekolah dapat melaksanakan sekolah, walaupun di desa tersebut belum ada SMP dan SMA, namun masih bisa melanjutkan ke SMP terdekat dengan desa, seperti SMPN 1 yang terletak di Kelurahan Sidoharjo yang tidak jauh dari Desa Karangwuluh sehingga anak usia sekolah dapat tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Desa Karangwuluh masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melaksanakan sekolah. Salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi keluarga. Tingkat pendidikan orangtua yang masih rendah akan berpengaruh terhadap pekerjaan orangtua dan tingkat pekerjaan orangtua yang rendah akan berpengaruh dengan pendapatan yang diperoleh oleh orangtua. Pendapatan yang rendah akan berpengaruh terhadap keadaan anak untuk kebutuhan sekolahnya.



Gambar 4.2 Kondisi Jalan di Desa Karangwuluh
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

B. Desa Gembongdadi

Desa Gembongdadi terdapat di sebelah selatan Kecamatan Suradadi, dan letaknya berbatasan langsung dengan Desa Karangwuluh. Desa ini memiliki kondisi jalan yang sebagian sudah beraspal. Daerah ini memiliki luas lahan pertanian yang luas. Tidak terdapat fasilitas transportasi umum di daerah ini karena letaknya yang jauh dari jalan raya.

Sarana pendidikan di daerah ini terdapat 3 SD, dengan jumlah siswa sebanyak 536, dan belum tersedianya sarana pendidikan lain seperti SMP dan SMA. Anak yang tidak sekolah di daerah ini dapat dikarenakan keadaan ekonomi yang rendah, mayoritas mata pencaharian yang dilakukan oleh orangtua adalah sebagai petani, sehingga pendapatan yang diterima tidak pasti. Berdasarkan data BPS Kec Suradadi dalam Angka, Desa Gembongdadi lebih dari setengah penduduk termasuk kategori keluarga miskin, dengan jumlah persentase 55,05%.



Gambar 4.3 Kondisi jalan di Desa Gembongdadi
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

C. Desa Karangmulya

Desa Karangmulya merupakan desa yang terletak disebelah timur Desa Gembongdadi, dan sebelah barat Desa Harjasari. Kondisi jalan di tempat ini rusak karena ketika hujan jalan menjadi kubangan air, seperti pada gambar 4.4.

Sarana pendidikan di Desa Karangmulya terdapat 2 SD, dengan banyaknya siswa sebanyak 482. Anak usia sekolah yang tidak sekolah di daerah ini dikarenakan oleh rendahnya pendidikan orangtua. Orangtua menganggap pendidikan yang tinggi tidak penting bagi anak, pendidikan yang rendah dari orangtua menjadikan anak tidak sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 4.4 Kondisi jalan di Desa
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

D. Desa Harjasari

Desa Harjasari terletak di selatan Kecamatan Suradadi, berbatasan langsung dengan Desa Karangmulya dan Desa Kertasari. Jarak daerah ini ke ibu kota kabupaten adalah 20km dengan lama tempuh 40 menit, namun jika ditempuh dengan jalan kaki selama 4 jam.

Desa Harjasari hanya memiliki 1 SD, sehingga anak usia sekolah dapat sekolah di tempat tersebut. Namun, apabila anak usia sekolah akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi maka dapat melanjutkan ke sekolah terdekat. Kondisi jalan yang sebagian belum beraspal menjadikan anak susah untuk melakukan aktivitas di luar desa. Selain itu, daerah ini tidak dilewati oleh fasilitas transportasi sehingga masyarakat sulit melakukan aktivitas di luar desa.



Gambar 4.5 Kondisi jalan di Desa
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

E. Desa Kertasari

Desa Kertasari terletak sebelah utara di Kecamatan Suradadi, desa ini hanya memiliki jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3, dengan total siswa sebanyak 736. Dengan adanya sekolah tersebut maka anak dapat melanjutkan ke sekolah terdekat dari Desa Kertasari. Letak desa ini yang jauh dari jalan raya/ jalan pantura mengakibatkan sulitnya transportasi umum yang tersedia yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan aktivitas.



Gambar

4.6. Kondisi jalan di Desa

Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

F. Desa Jatimulya

Desa Jatimulya terletak di tengah Kecamatan Suradadi, daerah ini memiliki 3 SD dan 1 SMP, dengan total siswa 859, namun masih ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, antara lain karena keadaan ekonomi orangtua anak usia sekolah dan pendidikan orangtua masih rendah. Pekerjaan yang dilakukan orangtua akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh orangtua. Pekerjaan yang dilakukan oleh orangtua lebih didominasi bekerja sebagai buruh sehingga pendapatan yang diperoleh tidak pasti, dan upah yang sedikit.

Pendidikan orangtua yang rendah dapat mempengaruhi anak untuk sekolah. Pendidikan terakhir yang ditempuh mayoritas hanya sampai SD. Pendidikan dapat mempengaruhi cara berfikir orangtua dalam mendidik anaknya. Orangtua menganggap bahwa anak tidak perlu sekolah tinggi, sehingga hal tersebut memberikan dorongan kepada anak agar tidak sekolah. Banyaknya sekolah yang

ada di Desa Jatimulya tidak dapat memberikan pengaruh banyak untuk anak usia sekolah agar mengikuti program wajib belajar 12 tahun.



Gambar 4.7. Kondisi jalan di Desa
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

G. Desa Jatibogor

Desa Jatibogor terletak sebelah barat di Kecamatan Suradadi, sarana pendidikan di desa ini terdapat 4 SD, dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.056 siswa. Anak yang tidak sekolah di daerah ini dapat dikarenakan oleh faktor kondisi ekonomi keluarga, pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yang mengakibatkan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 4.8. Kondisi Jalan di Desa
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

H. Desa Sidoharjo

Desa Sidoharjo terletak sebelah utara di Kecamatan Suradadi. Desa ini memiliki sarana pendidikan berupa 1 SD dan 1 SMP, dengan jumlah peserta didik sebanyak 651 siswa . Dari 11 desa yang ada di Kecamatan Suradadi, hanya ada dua desa yang terdapat SMP, salah satunya yaitu Desa Sidoharjo, hal ini menandakan kesempatan anak untuk melanjutkan sekolah lebih besar, dan harus dimanfaatkan sebaiknya oleh warga sekitar.

Desa ini terasuk dalam dataran rendah. Kondisi jalan di daerah ini baik dan beraspal. Aksesibilitas yang mudah menjadikan transportasi umum dapat melewati daerah ini. Transportasi umum yang tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan memudahkan anak untuk berangkat ke sekolah.



Gambar 4.9. Kondisi Jalan di Desa
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

I. Desa Purwahamba

Desa Purwahamba terletak sebelah utara di Kecamatan Suradadi, di desa tersebut terdapat wisata yang cukup terkenal yaitu Pur'in (Purwahamba Indah), yang di dalamnya terdapat kolam renang dan kebun binatang mini, dan letaknya yang di pinggir jalan raya pantura menjadikan tempat wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan karena aksesnya yang mudah.

Desa Purwahamba ini memiliki sarana pendidikan berupa 2 SD, dengan jumlah peserta didik 478 siswa. Aksesibilitas di desa ini dapat dikatakan mudah karena transportasi umum dapat melewati tempat ini.



Gambar 4.10. Kondisi Jalan di Desa
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

J. Desa Suradadi

Desa Suradadi terletak sebelah utara di Kecamatan Suradadi, Desa ini memiliki sarana pendidikan 5 SD, dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.131, jumlah ini terbanyak diantara 10 desa yang ada di Kecamatan Suradadi.

Letak Desa Suradadi ini berada di pinggir jalan pantura, menjadikan pusat dari Kecamatan Suradadi, daerah ini diharapkan menjadi penghubung antar desa, sehingga memudahkan masyarakat ketika melakukan aktivitas di kantor kecamatan. Kondisi jalan yang beraspal memudahkan transportasi umum untuk melewatinya. Desa Suradadi ini merupakan desa pesisir, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.



Gambar 4.11. Kondisi Jalan di Desa
Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

K. Desa Bojongsana

Desa Bojongsana terletak sebelah timur di Kecamatan Suradadi, berbatasan langsung dengan Desa Suradadi dan Desa Kertasari. Desa Bojongsana memiliki fasilitas pendidikan 1 SD, dengan jumlah peserta didik sebanyak 280, jumlah ini paling sedikit diantara desa yang lain yang ada di Kecamatan Suradadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang tidak sekolah di Desa Bojongsana dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain: keadaan ekonomi orangtua dan jarak yang digunakan untuk sekolah. Pendapatan yang diperoleh orangtua dapat berpengaruh terhadap kondisi anak untuk sekolah, anak membutuhkan dana untuk keperluan sekolah, seperti peralatan sekolah, buku, alat-alat tulis, pakaian dan lain-lain.

Desa Bojongsana hanya terdapat 1 SD, sedangkan penduduk yang ada pada daerah tersebut membutuhkan lebih dari 1 SD. Jarak yang ditempuh anak dari rumah menuju sekolah berpengaruh terhadap keadaan anak, anak usia sekolah yang berada di daerah tersebut akan mencari sekolah di luar desa tersebut atau mencari

sekolah lain yang lebih dekat. Mereka akan melanjutkan SMP ke Desa Jatimulya atau Desa Sidoharjo.



Gambar 4.12.

Kondisi Jalan di Desa

Sumber : Dokumentasi Penelitian Tahun 2019

4.2.4. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di SMA/MA/SMK di Suradadi.

4.2.4.1 SMK MA'ARIF NU 01 Suradadi

SMK Ma'Arif NU 01 Suradadi merupakan salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Suradadi yang terletak di jalan Sidoharja Km 2 Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan letak astronomisnya, SMK Ma'Arif Nu 01 berada pada $6^{\circ}53'5.99''\text{LS}$, $109^{\circ}14'16.97''\text{BT}$.

Visi : Menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat pendidikan dan latihan serta upaya untuk transformasi ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

Misi : Menciptakan generasi yang berilmu pengetahuan dan teknologi guna menghadapi tuntutan globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam akhlak ahlussunah waljama'ah.

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan mutu, siap kerja, produktif, memiliki etos kerja tinggi dan mendorong siswa untuk berjiwa mandiri dan berwirausaha.

Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan kepada anak didik untuk dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan Program Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

2. Meningkatkan Kualifikasi dan kompetensi guru

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat sekitarnya yang dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan mutu pendidikan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

4. Untuk membantu program Pemerintah dalam bidang pendidikan, sosial dan kesehatan guna membangun Indonesia seutuhnya.

Tujuan paket keahlian teknik kendaraan ringan

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik

2. Mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab

3. Mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki wawasan pengetahuan dan seni

4. Membekali peserta didik dengan pengetahuan ketrampilan dan sikap agar kompeten bagi yang berminat melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi.

SMK Ma'Arif NU 01 berdiri pada tahun 2007, diatas luas tanah 6.225 m². Sekolah ini dalam satu tahun menerima dana BOS sebanyak tiga kali, jumlah yang didapat sebanyak Rp. 1.400.000/ siswa. Setiap bulannya siswa dikenakan biaya SPP

sejumlah Rp. 130.000, dengan total siswa sebanyak 570. Terdapat tiga jurusan yang ada di SMK Ma'Arif Nu 01, teknik kendaraan ringan (TKR), Teknik Komputer Jaringan (TKJ), dan Akuntansi.

Tabel. 4.10. Data Peserta Didik Dan Kejuruan

No	Program Keahlian	Jumlah Siswa			
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Total
1.	Akuntansi Dan Keungan Lembaga	33	35	52	120
2.	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	116	96	90	302
3.	Teknik Komputer Dan Jaringan	65	52	31	148
Jumlah Total		214	183	173	570

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

Tabel 4.11 Data Guru Dan Tenaga Kependidikan

No	Status	Tingkat Pendidikan			
		D3	S1	S2	Total
1.	Guru	1	35	1	37
2.	Tendik	0	3	0	3
Jumlah Total		1	38	1	40

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

Tabel. 4.12 Jumlah Rombongan Belajar dan data Ruang Kelas

Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas
Kelas X	7	5
Kelas XI	6	5
Kelas XII	6	5
Total	19	15

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

Tabel. 4.13 Data Bangunan/ Ruang Lain

No	Jumlah	Nama Ruang	Kondisi
1.	15	Ruang Kelas	Baik
2.	1	Ruang Guru	Baik
3.	6	Kamar Mandi	Baik
4.	1	Ruang Perpustakaan	Baik
5.	1	Ruang Tata Usaha	Baik
6.	1	Ruang Administrasi	Baik
7.	1	Ruang Kepala Sekolah	Baik
8.	1	Ruang Praktek TKR	Baik
9.	2	Ruang Lab Komputer	Baik

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

4.2.4.2 Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di SMA MUHAMMADIYAH Suradadi

SMA MUHAMMADIYAH Suradadi merupakan salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl Purwa Suradadi Km 16, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Berdasarkan letak astronomisnya, SMA Muhammadiyah berada pada $6^{\circ}52'25.45''\text{LS}$, $109^{\circ}16'27.29''\text{BT}$.

Visi

Unggul dalam Prestasi dilandasi iman, taqwa, dan akhlak mulia.

Misi

1. Memiliki nilai-nilai keimanan
2. Berprestasi pada kompetensi akademis dan non akademis
3. Memiliki ketrampilan, kemampuan dan sikap dalam berkompetisi di era global
4. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk seluruh warga sekolah

SMA Muhammadiyah Suradadi berdiri pada tahun 1987, diatas luas tanah 2.885 m^2 . Sekolah ini dalam satu tahun menerima dana BOS sebanyak tiga kali, jumlah yang didapat sebanyak Rp. 1.400.000/ siswa. Setiap bulannya siswa dikenakan biaya SPP sejumlah Rp. 100.0000, dengan total siswa sebanyak 49.

Tabel. 4.14 Data Guru Dan Tenaga Kependidikan

No	Status	Tingkat Pendidikan			
		D3	S1	S2	Total
1.	Guru	0	14	0	14
2.	Tendik	1	0	0	1
Jumlah Total		1	14	0	15

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

Tabel. 4.15 Jumlah Rombongan Belajar dan data Ruang Kelas

Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas
Kelas X MIPA	1	1
Kelas X IIS	1	1
Kelas XI MIPA	1	1
Kelas XI IIS	1	1
Kelas XII MIPA	1	1
Kelas XII IIS	1	1
Jumlah	6	6

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

Tabel. 4.16 Data Bangunan/ Ruangan Lain

No	Jumlah	Nama Ruang	Kondisi
1.	6	Ruang Kelas	Baik
2.	1	Ruang Guru	Baik
3.	2	Kamar Mandi	Baik
4.	1	Ruang Perpustakaan	Baik
5.	1	Ruang Tata Usaha	Baik
6.	1	Ruang Administrasi	Baik
7.	1	Ruang Kepala Sekolah	Baik
8.	1	Ruang Laboraturium IPA	Baik
9.	1	Tempat Ibadah	Baik

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

4.2.4.3 Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun SMA NU 01 Suradadi.

SMA NU 01 Suradadi merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Suradadi yang beralamat di Jalan Raya Suradadi KM 17, Suradadi. Berdasarkan letak astronomisnya, sekolah ini berada pada 6°51'58.70"LS, 109° 7'59.30"BT.

SMA NU 01 Suradadi berdiri pada tahun 1989, diatas luas tanah 2.623 m². Sekolah ini dalam satu tahun menerima dana BOS sebanyak tiga kali, jumlah yang didapat sebanyak Rp. 1.400.000/ siswa. Setiap bulannya siswa dikenakan biaya SPP sejumlah Rp. 85.000, dengan total siswa sebanyak 148.

Visi

Unggul dalam prestasi berdaya saing tinggi berdasarkan IPTEK dan IMTAQ serta peduli lingkungan

Misi

1. Membentuk generasi yang cerdas dalam menggali ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan jati diri dengan dibekali iman dan taqwa
2. Mendorong dan membantu siswa dalam mengembangkan potensi akademik dan non akademik
3. Menumbuhkan semangat keunggulan secara baik kompetitif maupun komperatif
4. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin dengan tadarus Al-Quran dan sholat berjamaah
5. Menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dengan pendekatan sosial dan budaya

Tabel 4.17 Data Guru Dan Tenaga Kependidikan

No	Status	Tingkat Pendidikan			
		D3	S1	S2	Total
1.	Guru	2	19	0	21
2.	Tendik	0	2	0	2
Jumlah Total		2	21	0	23

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

Tabel. 4.18 Jumlah Rombongan Belajar dan data Ruang Kelas

Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Ruang Kelas
Kelas X MIPA	1	1
Kelas X IIS	1	1
Kelas XI MIPA	1	1
Kelas XI IIS	1	1
Kelas XII MIPA	1	1
Kelas XII IIS	1	1
Jumlah	6	6

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

Tabel. 4.19 Data Bangunan/ Ruang Lain

No	Jumlah	Nama Ruang	Kondisi
----	--------	------------	---------

1.	6	Ruang Kelas	Baik
2.	1	Ruang Guru	Baik
3.	4	Kamar Mandi	Baik
4.	1	Ruang Perpustakaan	Baik
5.	1	Ruang Tata Usaha	Baik
6.	1	Ruang Administrasi	Baik
7.	1	Ruang Kepala Sekolah	Baik
8.	1	Ruang Laboratorium IPA	Baik
9.	1	Tempat Ibadah	Baik

Sumber : Data Monografi Sekolah Tahun 2019

4.3 Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kecamatan Suradadi, yaitu 29% yang menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Tegal yaitu sebesar 76%. Hal tersebut menandakan bahwa di Kecamatan Suradadi terdapat sejumlah masalah. Masalah tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa hambatan, yaitu faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Faktor eksternal dari anak usia 16-18 tahun menjadikan anak tersebut tidak sekolah. Hambatan yang mempengaruhi diantaranya tingkat pendidikan orangtua, tingkat pendapatan orangtua, jumlah tanggungan orangtua, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor jarak dari rumah ke sekolah, fasilitas jalan, dan fasilitas transportasi.

4.3.1 Tingkat Pendidikan Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

Tabel. 4.20. Tingkat Pendidikan Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ijasah terakhir	SD	33	57,8%
		SMP	10	17,5%
		SMA	5	8,7%
		Tidak Sekolah	9	15,7%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas terdapat informasi mengenai tingkat pendidikan orangtua yang memilili anak usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, mayoritas penduduk di Kecamatan Suradadi merupakan lulusan SD yaitu sebesar 57,8% dan paling sedikit lulusan SMA yaitu 8,7%, dan terdapat 15,7% dari keseluruhan yang tidak sekolah. Lingkungan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak keluarga dan latar belakang tingkat pendidikan orangtua. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hadito (1979); Hurlock (1974) menyatakan lingkungan yang terdekat dengan anak adalah keluarga, faktor latar belakang tingkat pendidikan orangtua merupakan sesuatu yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Latar belakang tingkat pendidikan orangtua ini berhubungan dengan cara mereka mengasuh anak. Hal ini menandakan semakin tinggi pendidikan terkahir orangtua akan makin baik pula cara pengasuhan anak dan akibatnya perkembangan anak terpengaruh secara positif. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan orangtua maka akan kurang baik dalam mengasuh anak, sehingga perkembangan anak berjalan kurang menguntungkan. (Sulistyaningsih, 2005:3)

Tabel. 4.21. Tingkat Pendidikan Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Pendidikan Non-Formal	Penah	2	3,5%
		Tidak pernah	55	96,4%
	Jumlah		57	100%

Sumber :Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel 4.21 diketahui jumlah penduduk Kecamatan Suradadi yang menempuh pendidikan non-formal, diketahui terdapat 2 responden yang menempuh pendidikan tersebut, dan 55 responden lainnya menempuh pendidikan formal. Dari 2 responden tersebut menempuh pendidikan di PKBM paket A (setara SD).

Tabel. 4.22. Tingkat Lamanya Sekolah Formal Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Lamanya Sekolah Formal	<6 Tahun	9	15,7%
		6-12 Tahun	33	57,8%
		13-15 Tahun	10	17,5%
		>15 Tahun	5	8,7%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat diketahui waktu yang dibutuhkan dalam menempuh pendidikan, dari 57 responden, Lamanya pendidikan formal orangtua dapat dilihat pada tabel 4.22. lamanya pendidikan orangtua paling banyak selama 6-12 tahun atau sebesar 57,8%, dan paling sedikit yaitu lebih dari 15 tahun

sebanayak 8,7%. rata-rata pendiidkan formal responden adalah 12 tahun. Lamanya pendidikan formal 6-12 tahun yaitu SD, 13-15 tahun yaitu SMP.

Tabel. 4.23.Tingkat Lamanya Sekolah Non-Formal Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
4.	Lamanya Sekolah Non-Formal	Kejar paket C (3 tahun)	0	0%
		Kejar paket B (3 tahun)	0	0
		Kejar paket A (6 tahun)	2	3,5%
		Tidak Pernah	55	96,4%
	Jumlah		57	100%

Sumber :Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel 4.23 terdapat informasi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan non formal yaitu lebih dari 6 tahun, karena PKBM membutuhkan waktu yang sama dengan sekolah formal lainnya.

Program paket A merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat usia sekolah dan usia dewasa yang karena berbagai sebab tidak melanjutkan pendidikan.

4.3.2 Tingkat Pendapatan Orangtua yang Mempunyai Anak usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

Tabel 4.24 Tingkat Pendapatan Orangtua yang Mempunyai Anak usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pendapatan Setiap Bulan	< Rp. 1.500.000	51	89,4%
		Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	6	10,5%
		Rp. 2.500.000 - Rp 3.500.000	0	0%
		> Rp.3.500.000	0	0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Pekerjaan yang dilakukan oleh orangtua anak yang tidak melanjutkan sekolah bermacam-macam, sebagian besar pekerjaan yang dilakukan yaitu sebagai petani, namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, jasa transportasi, atau bahkan tidak bekerja.

Kondisi ekonomi seseorang dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh. Tabel 4.24 menunjukkan tingkat pendapatan orangtua yang memiliki anak usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan ke SMA. Mayoritas pendapatannya kurang dari 1500.000 per bulan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah tersebut termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 89,4%. Hal ini

dikarenakan jenis pekerjaan pokok yang diperoleh dari responden tergolong memiliki pekerjaan yang tidak tetap sehingga memiliki pendapatan yang sedikit.

Fenomena yang terjadi kebanyakan orangtua memiliki harapan anaknya menjadi orang yang sukses baik pendidikan maupun karir, sehingga nantinya mereka dapat memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, “walaupun motivasi yang ada dalam diri anak atau siswa sangat kuat jika kondisi sosial dan kondisi ekonomi orangtuanya kurang mendukung, maka akan menghambat motivasi anak dalam mencapai semua keinginan-keinginan tersebut”. (Wastry Soemanto, 2003:205).

Tabel 4.25 Tingkat Pendapatan Sampingan Orangtua yang Mempunyai Anak usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Pendapatan Sampingan	< Rp. 1.500.000	57	100%
		Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	0	0%
		Rp. 2.500.000 - Rp 3.500.000	0	0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Masyarakat di Kecamatan Suradadi mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan, maka perlu pekerjaan sampingan lain di luar menangkap ikan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Mereka bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Nelayan seharusnya memiliki pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu kosong saat tidak musim ikan, karena nelayan bekerja hanya 20-22 hari per bulan atau sekitar 10 bulan saja dalam setahun. Mereka dapat menjadi buruh bangunan

atau bertani dan budidaya ikan di lahan kosong wilayah sekitar. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan keluarga para nelayan tersebut agar taraf hidup mereka lebih baik.

Tabel 4.26 Total Pengeluaran Orangtua yang Mempunyai Anak usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Total Pengeluaran Setiap Bulan	< Rp. 1.500.000	3	5,2%
		Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	54	94,7%
		Rp. 2.500.000 - Rp 3.500.000	0	0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Tabel diatas menjelaskan informasi mengenai total pengeluaran yang dikeluarkan keluarga perbulan, dapat diketahui rata-rata responden termasuk dalam kategori Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000 atau 94,7%, dan sisanya termasuk dalam kategori < Rp. 1.500.000. Mengetahui pengeluaran keluarga merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat kehidupan masyarakat.

Tabel 4.27 Tingkat Kecukupan Kebutuhan Sehari-hari Orangtua yang Mempunyai Anak usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
4.	Kecukupan Kebutuhan Sehari-hari	Kurang dari cukup	43	75,4%
		Tidak cukup	9	15,7%
		Cukup	5	8,7%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas terdapat informasi mengenai kecukupan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal yang mayoritas sebagai nelayan, sebanyak 43 atau 75,4% dan yang cukup hanya 9 orang dengan persentase 15,7%. Mereka mencari pekerjaan sampingan, setiap rumah tangga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan setiap anggotanya untuk mencapai tingkat kepuasan serta kesejahteraan yang diinginkan.

4.3.3 Jumlah Tanggungan Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

Tabel 4.28 Jumlah Anggota Keluarga yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Jumlah anggota keluarga	3	6	10,5%
		4	10	17,5%
		5	34	59,6%
		>5	7	12,2%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas terdapat informasi mengenai jumlah anggota keluarga responden, yang memiliki anak 1 berjumlah 6 atau 10,5%, responden yang memiliki anak lebih dari 3 berjumlah 7 atau 12,2%, rata-rata mereka memiliki 3 anak atau 59,6%. Tingkat jumlah anggota keluarga, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga,

begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Tabel 4.29 Jumlah Anak yang dimiliki Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Jumlah anak	1	6	10,5%
		2	10	17,5%
		3	34	59,6%
		>3	7	12,2%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas terdapat informasi mengenai jumlah anak yang dimiliki oleh responden, mayoritas mereka memiliki 3 anak atau 59,6%. Jumlah anak dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang berperan dalam ketersediaan pangan dalam keluarga. Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang sosial ekonominya cukup, akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang diterima anak. Sedangkan di keluarga yang ekonominya kurang, jumlah anak yang banyak akan mengakibatkan selain kurangnya kasih sayang dan perhatian pada anak, juga kebutuhan primer seperti makanan, sandang dan rumahpun tidak terpenuhi.

Tabel 4.30. Jumlah Anggota diluar Keluarga Inti Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Jumlah anggota diluar keluarga inti	Tidak ada	42	73,6%
		1	4	7,0%
		2	7	12,2%
		>2	4	7,0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Tabel tersebut menjelaskan jumlah anggota keluarga inti responden, terdapat 42 atau 73,6% yang tinggal bersama keluarga inti, dan paling banyak terdapat 7 orang yang tinggal bersama lebih dari keluarga inti. Keluarga besar merupakan gabungan dari beberapa keluarga inti atau ditambah dengan anggota lain yang sudah atau belum menikah.

4.3.4 Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Keluarga yang Memiliki Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

Tabel 4.31. Dukungan yang diberikan Kepada Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dukungan yang diberikan Kepada Anak	Motivasi belajar	51	89,4%
		Melengkapi semua kebutuhan anak	2	3,5%
		Lainnya...	3	5,2%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Tabel diatas terdapat informasi mengenai dukungan yang diberikan orangtua terhadap anak, terdapat banyak bentuk dalam motivasi belajar. Orangtua berperan penting dalam membantu anak menumbuhkan motivasi berprestasi yang tinggi. Orangtua merupakan guru pertama bagi anak karena yang pertama kali mendidik dan menanamkan pendidikan kepada anak adalah orangtua.

Orangtua hendaknya menyediakan fasilitas belajar yang memadai, memberikan motivasi dan dukungan serta membimbing anak dalam belajar. Benjamin Bloom (Reni Akbar-awadi, 2003: 94) menyatakan bahwa dorongan orangtua merupakan hal yang utama dalam mengarahkan tujuan belajar anak. Dukungan orangtua dalam bentuk kasih sayang, perhatian dan penghargaan akan menumbuhkan mental yang sehat bagi anak.

Tabel 4.32 Waktu yang dibutuhkan Orangtua Membimbing Belajar Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Waktu yang di Butuhkan Bpk/Ibu Membimbing Anak untuk Belajar	<1 jam	57	100%
		1-3 jam	0	0%
		4-5 jam	0	0%
		>5 jam	0	0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Tabel diatas terdapat informasi mengenai waktu yang biasa diperlukan orangtua dalam mendampingi anak untuk belajar, semua responden meluangkan waktu kurang dari satu jam daam mendampingi anak untuk belajar.

Tabel. 4.33 Teman Bergaul Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Bergaul dengan siapakah anak anda setiap harinya	Teman sebaya yang melanjutkan sekolah	12	21,0%
		Teman sebaya yang tidak melanjutkan sekolah	6	10,5%
		Teman sebaya yang sudah bekerja	34	59,6%
		Orang dewasa	5	8,7%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa mayoritas anak responden bergaul dengan teman sebaya yang sudah bekerja, interaksi dengan teman sebaya merupakan permulaan hubungan persahabatan yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik. Teman sebaya memiliki peran bagi perkembangan perilaku sosial anak, tmena sebaya memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang di luar anggota keluarganya.

Tabel 4.33. Alasan Anak Usia 16-18 tahun Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
4.	Alasan anak tidak melanjutkan Wajib Belajar 12 Tahun	Biaya	35	61,4%
		Faktor internal anak	12	21%
		Pengaruh teman	10	17,5%
		Lainnya..	0	0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas terdapat informasi mengenai alasan anak tidak melanjutkan sekolah, sebanyak 35 atau 61,4% dikarenakan faktor biaya. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berdampak maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.

Tabel 4.34 Sosialisasi mengenai Progran Wajib Belajar 12 Tahun dari Dinas Pendidikan

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
5.	Adakah sosialisasi mengenai Progran Wajib Belajar 12 Tahun dari Dinas Pendidikan	Ada	0	0%
		Tidak	57	100%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa kurangnya keterlibatan dari Dinas Pendidikan Kab Tegal dalam sosialisasi untuk program ini, dalam program wajib belajar 12 tahun ini, dinas pendidikan memiliki tugas didalamnya, yaitu salah satunya melakukan sosialisasi untuk program ini, melakukan koordinasi dengan semua yang terlibat, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini di lapangan.

Tabel 4.35 Tujuan Orangtua Menyekolahkan Anak.

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
6.	Tujuan Menyekolahkan Anak	Agar dapat melanjutkan ke Jenjang Lebih Tinggi	2	3,5%
		Agara dapat bekerja di tempat yang layak	13	22,8%
		Agara menjadi orang pintar	12	21,0%
		Agar dapat hidup mandiri	30	52,6%
	Jumlah		57	100%

Sumber :Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas diketahui informasi mengenai tujuan orangtua menyekolahkan anak, semua orangtua ingin yang terbaik untuk anaknya dan dapat hidup mandiri. Tujuan atau motivasi orangtua itu sendiri merupakan dorongan orangtua yang timbul karena kemampuannya, dimana kemampuan orang tua karena kondisi sosial yang baik. Kondisi sosial keluarga meliputi kondisi ekonomi yaitu pendapatan dan kondisi sosial yang baik yaitu latar belakang pendidikan orangtua, harapan atau keinginan orangtua, cita-cita, lingkungan sekitar, dan teman sebaya.

Keutuhan keluarga dapat membawa dampak pada psikis anak dalam menerima ataupun melakukan kegiatan belajar. Karena dengan dukungan dan dorongan keluarga maka anak akan memiliki semangat untuk melakukan kegiatannya. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat pertama diaman anak belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.

Mayoritas aktivitas yang dilakukan anak usia 16-18 tahun di Kecamatan Suradadi yaitu bekerja sebanyak 43 orang atau 75,4%, hal ini bisa dipengaruhi karena banyak diantara mereka yang beraktivitas dengan anak yang sudah bekerja sebanyak 23 orang atau 40,3%. Lingkungan keluarga memberikan pengaruh terhadap anak, kondisi lingkungan dimana anak tinggal dan berada dapat menjadikan faktor penghambat kelangsungan pendidikan anak. Keluarga memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian anak. Dukungan dan dorongan keluarga dapat memberikan hal yang positif maupun negative kepada anak untuk melanjutkan pendidikan, orangtua sebenarnya paham akan pentingnya pendidikan namun karena berbagai faktor yang mengharuskan anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena harus ikut bekerja untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.3.5 Faktor Jarak dari Rumah ke Sekolah

Tabel 4.36 Faktor Jarak dari Rumah ke Sekolah

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Waktu yang diperlukan dari rumah menuju ke sekolah	<10 menit	3	5,2%
		10-15 menit	29	50,8%
		16-25 menit	21	36,8%
		> 25 menit	4	7,0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata waktu yang diperlukan untuk menempuh dari rumah ke sekolah yaitu antara 10-15 menit. Jarak tempat tinggal merupakan faktor lingkungan, faktor yang mempengaruhi jarak tempuh siswa ke sekolah salah satunya adalah sarana yang digunakan, jika sarana menimbulkan

kendala bagi jarak tempuh, berarti jarak tempat tinggal dapat mengganggu proses belajar siswa, dengan demikian jauh dekatnya jarak dapat menentukan kondisi siswa terutama dalam meraih prestasi belajar. Semakin jauh jarak yang ditempuh siswa dari tempat tinggal ke sekolah maka semakin banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Hal ini mengakibatkan waktu yang digunakan untuk belajar semakin berkurang.

Tabel 4.37 Faktor Jarak dari Rumah ke Sekolah

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Jarak dari rumah ke sekolah	< 1 km	3	5,2%
		1-3 km	14	24,5%
		3-5 km	27	47,3%
		>5 km	13	22,8%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Tabel diatas menjelaskan jarak yang ditempuh dari rumah menuju sekolah, rata-rata jarak tempuh siswa yaitu 3-5 km, dan paling dekat yaitu kurang dari 1 km. Lokasi rumah ke sekolah yang terlalu jauh berdampak pada siswa kurang aktif dan bersemangat di dalam kelasnya, atau dengan kata lain siswa mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut dapat dikarenakan karena keadaan sehari-hari siswa terpaksa berjalan kaki, karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai untuk memfasilitasi transportasi ke sekolah. Siswa sampainya ke sekolah sudah dalam keadaan lelah, dan dalam keadaan lelah siswa tidak bersemangat mengikuti kegiatan belajar.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi anak tidak sekolah, salah satunya yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan jarak mudah tidaknya

seseorang untuk mencapai wilayah dengan menggunakan suatu alat bantu. Jarak merupakan sesuatu yang dapat diukur sebagai dasar dari studi geografi. Jarak menjadi obek utama dalam pembicaraan mengenai karakteristik permukaan bumi, jarak yang jauh dari rumah menuju ke sekolah membutuhkan biaya yang lebih. Jarak yang ditempuh anak dari rumah menuju sekolah dapat dilihat pada tabel 20. waktu yang diperlukan anak untuk menuju sekolah paling banyak antara 10-15 menit atau persentase sebesar 50,8%. dan mayoritas jarak yang ditempuh sejauh 3-5 km sebanyak 27 anak atau setara 47,3%.

4.3.6 Fasilitas Jalan yang Dilalui dari Rumah Menuju Sekolah

Tabel 4.38 Fasilitas Jalan yang Dilalui dari Rumah Menuju Sekolah

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Jenis jalan yang dilalui	Arteri	53	92,5%
		Kolektor	4	7,0%
		Lokal	0	0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui informasi mengenai frekuensi kategori jenis jalan yang dilalui, sebanyak 53 responden atau 92,5% memilih kategori arteri, suatu arus lalu lintas dapat dikatakan lancar apabila arus lalu lintas tersebut dapat melewati suatu ruas jalan tanpa mengalami hambatan atau gangguan dari jalan atau arah lain. Masalah lalu lintas yang timbul di jalan raya dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi serta keamanan selama dalam perjalanan, misalnya faktor jalan (fisik), faktor lalu lintas (kendaraan), dan faktor manusia.

Tabel 4.39 Fasilitas Jalan yang Dilalui dari Rumah Menuju Sekolah

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
2.	Kondisi jalan di desa	Rusak	6	10,5%
		Berlubang	11	19,2%
		Berbatu	35	61,4%
		Aspal	5	8,7%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas diketahui informasi mengenai kondisi jalan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, mayoritas kondisi jalan masih berbatu atau sekitar 61,4% , dan 8,7% jalan sudah beraspal. Terdapat banyak pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan infrastruktur jalan, selain menjadi arus mobilitas sosial, jalan yang baik dan memadai juga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dnegan baik.

Tabel 4.40 Fasilitas Jalan yang Dilalui dari Rumah Menuju Sekolah

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Situasi jalan dari rumah menuju sekolah	Padat lalu lintas	35	61,4%
		Sepi	10	17,5%
		Rawan kecelakaan	6	10,5%
		Macet	6	10%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui informasi mengenai situasi jalan dari rumah menuju sekolah. Terdapat beragam kategori situasi jalan, rata-rata menunjukkan bahwa situasi padat lalu lintas sebanyak 35 atau 61,4%, situasi jalan sepi sebanyak 10 atau 17,5%, lalu sisanya rawan kecelakaan dan macet sebanyak masing-masing 6 atau 10,5%. setiap faktor kecelakaan biasanya disebabkan oleh

beberapa faktor yang muncul seperti faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan/ lingkungan atau kombinasi dari beberapa faktor tersebut (William, 1968).

Fasilitas jalan yang dilalui dari rumah menuju sekolah dapat dilihat pada tabel 4.40. Tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas jenis jalan yang terdapat di kecamatan Suradadi yaitu jalan arteri dengan persentase sebesar 92,9%, kondisi jalan berbatu-batu sebanyak 61,4% walaupun terdapat jalan beraspal namun hanya 8,7%, situasi jalan saat jam sekolahpun termasuk padat lalulintas dengan persentase sebesar 61,4%.

4.3.7 Transportasi yang Digunakan untuk Melakukan Perjalanan dari Rumah Menuju ke Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

Tabel 4.41. Transportasi yang Digunakan untuk Melakukan Perjalanan dari Rumah Menuju ke Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kendaraan yang digunakan anak untuk sekolah	Angkutan umum	32	56,1%
		Sepeda motor	12	21,0%
		Sepeda	13	22,8%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Kendaraan yang digunakan anak untuk melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah dapat dilihat pada tabel diatas. Tabel tersebut dapat diketahui bahwa kendaraan yang paling sering digunakan anak untuk sekolah adalah angkutan umum dengan persentase sebesar 56,1%. kendaraan yang jarang digunakan adalah sepeda motor dengan persentase sebesar 21%. anak tidak menggunakan sepeda motor karena tidak semua anak memiliki kendaraan

bermotor, walaupun memiliki motor, anak tersebut belum diijinkan untuk mengendarai sepeda motor karena belum memiliki SIM.

Tabel 4.42 Transportasi yang Digunakan untuk Melakukan Perjalanan dari Rumah Menuju ke Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
3.	Jumlah Angkutan Umum yang melewati	1	0	0%
		2	0	0%
		3	3	5,2%
		>3	54	94,7%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Fasilitas transportasi merupakan bagian yang sangat penting karena transportasi sebagai dasar seseorang melakukan perjalanan. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Tabel diatas menampilkan lebih dari 3 transportasi umum yang melewati rumah dengan persentase sebesar 94,7% sehingga anak dapat memanfaatkan fasilitas transportasi tersebut untuk berangkat sekolah. 5,2% transportasi umum yang melewati rumah.

Tabel. 4.43. Transportasi yang Digunakan untuk Melakukan Perjalanan dari Rumah Menuju ke Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
4.	Transportasi umum apa saja yang ada di sekitar	Ojek	2	2,5%
		Mini Bus	53	92,9%
		Becak	1	1,7%
		Lainnya....	0	0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Transportasi umum yang ada di sekitar responden yaitu minibus dengan jumlah 53 atau 92,9%, sisanya merupakan ojek dan becak. Terdapat banyak

kelebihan jika menggunakan minibus, harganya yang terjangkau dan kapasitas yang besar memungkinkan mengangkut lebih banyak orang. Dan jumlahnya yang banyak sangat membantu aktivitas masyarakat dan pelajar sekitar.

Tabel 4.44 Transportasi yang Digunakan untuk Melakukan Perjalanan dari Rumah Menuju ke Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
5.	Biaya untuk naik Angkutan Umum	> Rp. 5000	51	89,4%
		Rp.3000- Rp. 5000	4	7,0%
		Rp. 2000- Rp 3000	2	3,5%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui informasi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah di Kecamatan Suradadi, mayoritas mereka mengeluarkan >Rp.5000.

Tabel 4.45. Transportasi yang Digunakan untuk Melakukan Perjalanan dari Rumah Menuju ke Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
6.	Daerah tempat tinggal sering terjadi kemacetan saat jam berangkat sekolah	Ya	57	100%
		Tidak	0	0%
	Jumlah		57	100%

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Tabel 4.46. Transportasi yang Digunakan untuk Melakukan Perjalanan dari Rumah Menuju ke Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variable	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
7.	Kemudahan dalam menjangkau angkutan umum	Ya	49	85%
		Tidak	8	14,0% %

	Jumlah	57	100%
--	---------------	-----------	-------------

Sumber : Data Penelitian Tahun 2019

Kendaraan yang digunakan anak untuk melakukan perjalanan dari rumah menuju ke sekolah dapat dilihat pada tabel 4.46. dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa kendaraan yang paling sering digunakan untuk anak sekolah adalah transportasi umum dengan persentase sebesar 56,1%. kendaraan yang jarang digunakan oleh anak adalah sepeda motor dengan persentase sebesar 21%. banyak faktor yang membuat anak tidak menggunakan kendaraan bermotor, usia 16-18 tahun belum diperbolehkan dan tidak diijinkan untuk mengendarai sepeda motor.

Fasilitas transportasi merupakan sektor yang sangat penting karena transportasi sebagai alat untuk melakukan perjalanan. Transportasi digunakan untuk mempermudah manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Tabel 4.43 menampilkan data lebih dari 3 transportasi umum yang melewati rumah dengan persentase 94,7%, sehingga anak dapat memanfaatkan fasilitas transportasi tersebut untuk berangkat sekolah.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

Jumlah anak usia sekolah di SMA/MA (16-18 tahun) dan APK APMnya disatukan pendidikan tersebut, menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah pada setiap tahunnya. Kondisi tersebut jika dilihat dari sisi pembangunan SDM secara umum cukup menggembirakan karena tujuan program ini mengacu kearah tersebut. Kecenderungan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi berjalan dengan baik dan sukses. Walaupun masih terdapat hambatan-hambatan, namun dalam proses pelaksanaannya tetap dilakukan upaya-upaya yang inovatif.

Sekolah yang terdapat di lingkungan Kecamatan Suradadi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekolah yang telah melakukan sosialisasi mengenai program ini memberikan pemahaman terutama kepada orangtua, menjaga agar tidak ada peserta didik yang putus sekolah, mengusulkan data peserta didik untuk menerima dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), dan tentu melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP tersebut.

BOP bertujuan untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun, dengan harapan tidak ada lagi anak yang tidak sekolah dengan alasan tidak memiliki biaya, dengan kata lain program BOP membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain yang mampu supaya mereka memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu sampai tamat selama 12 tahun.

Namun disini sekolahpun masih memiliki permasalahan tersendiri yaitu pada awal tahun biasanya sekolah terlambat dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Lambatnya pengesahan anggaran dana APBD oleh pemerintah pada setiap awal tahun menyebabkan sekolah juga terlambat menerima dana BOP. Keterlambatan penerimaan dana BOP tersebut yang mengakibatkan sekolah harus menunda kegiatan sekolahnya, dikarenakan pelaksanaan kegiatan sekolah ini hanya bergantung pada dana BOP yang telah dianggarkan oleh pemerintah.

Faktanya dalam pelaksanaan bahwa masih terdapat beberapa anak di Kecamatan Suradadi yang tidak melanjutkan ke SMA. Jika dilihat dari faktor eksternal, masih terdapat anak yang tidak sekolah di kecamatan Suradadi dikarenakan oleh tingkat pendidikan orangtua, tingkat pendapatan orangtua, jumlah tanggungan orangtua, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor jarak dari rumah ke sekolah, fasilitas jalan dan transportasi.

4.4.2 Hambatan-hambatan pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

Dari hasil penelitian pada tahun 2019, menunjukkan tingkat pendapatan orangtua di Kecamatan Suradadi menurut penggolongan BPS termasuk golongan rendah, artinya orangtua anak yang tidak sekolah dapat digolongkan pada masyarakat yang kurang beruntung dari segi ekonomi sebagai penopang bagi kelancaran pendidikan anak-anaknya. Pendapatan terendah yang dimiliki oleh orangtua adalah Rp. 250.000,00 dan pendapatan tertinggi orangtua Rp.1.500.000,00.

Penghasilan orangtua hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja (makan./minum dan pakaian), sehingga tidak ada lagi anggaran dana untuk pendidikan anaknya. Situasi tersebut, menunjukkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya dalam memenuhi kebutuhan sekolahnya, misal; untuk membeli buku dan peralatan belajar lainnya. Kondisi ini jelas memprihatinkan dan sebagai faktor penghambat tuntasnya wajib belajar 12 tahun yang tentu saja memerlukan perhatian dari berbagai kalangan yang bertanggungjawab terhadap sukses dan tuntasnya wajib belajar 12 tahun.

Tingkat pendidikan formal orangtua 57,8% pada tingkat SD, ijazah terakhir yang di peroleh orangtua rata-rata adalah berada di tingkat SD dengan lamanya sekolah 12 tahun. Orangtua yang kurang pendidikan kurang mampu memiliki gagasan jauh ke depan terhadap kemajuan dan perkembangan anaknya. Pendidikan formal yang ditempuh orangtua berpengaruh terhadap kelanjutan pendidikan anaknya. Karena hal tersebut akan menjadi dorongan dan motivasi anak untuk maju.

Tingkat pendidikan orangtua akan berpengaruh terhadap jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dilakukan oleh orangtua. Hal ini terbukti bahwa di Kecamatan Suradadi rata-rata jenis pekerjaan orangtua yaitu sebagai nelayan, karena letak Kecamatan Suradadi berada di jalan raya pantura dimana letaknya tidak jauh dari bibir pantai., sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk sekitar.

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang belum dewasa. Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut

tidak ada, misal: ada ibu namun tidak ada ayah (meninggal/bercerai), maka keluarga tersebut tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang utuh lagi. Ini disebut keutuhan keluarga secara struktur. Kemudian ada pula keutuhan dalam interaksi, yaitu adanya interaksi sosial yang wajar (harmonis).

Ketidakeutuhan keluarga tentunya memiliki pengaruh negatif bagi perkembangan sosial seorang anak. Lingkungan keluarga memberikan dampak dimana keluarga memberikan anggapan penting untuk masa depan anak. Berdasarkan hasil observasi bahwa bentuk rumah daerah penelitian 61% memiliki kondisi rumah yang kurang baik. Kondisi tempat tinggal di daerah penelitian 80% rata-rata memiliki kondisi rumah yang kotor. Bentuk lingkungan di daerah penelitian rata-rata merupakan sebuah pedesaan.

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lainnya dengan melalui transportasi. Jarak dekatnya rumah ke sekolah mempengaruhi minat siswa untuk sekolah. Semakin dekat jarak antar daerah berarti semakin mudah interaksi terjadi dan semakin mudah daerah tersebut mengalami kemajuan. Jarak yang ditempuh anak untuk sekolah rata-rata adalah 3km-5km dan rata-rata kendaraan yang digunakan untuk berangkat sekolah didominasi oleh transportasi umum sehingga membutuhkan dana/biaya untuk berangkat dan pulang sekolah. Transportasi umum melewati desa lebih dari 3 jenis angkutan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa aksesibilitas memberikan pengaruh besar dimana di Kecamatan Suradadi memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah walaupun letaknya dipinggir jalan raya pantura.

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi adalah karakteristik keluarga. Karakteristik keluarga memberikan sumbangan dalam hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Besarnya jumlah keluarga di daerah ini berpengaruh terhadap kondisi anak untuk melanjutkan sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah. Rata-rata jumlah keluarga inti di Kecamatan Suradadi adalah 5 orang. Semakin banyak tanggungan yang ditanggung oleh suatu keluarga maka semakin tinggi pengeluarannya dan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan setiap anggota berbeda-beda, seperti kebutuhan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selama 3 periode (tahun 2016-2018) mengalami kenaikan. Tingkat APK mengalami kenaikan sebesar 1,58% dan tingkat APM sebesar 1,33%

5.1.2 Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, antara lain: tingkat pendapatan orangtua tergolong rendah yaitu kurang dari Rp. 1.500.000, tingkat pendidikan terakhir orangtua rata-rata di tingkat SD sebesar 57,8%, jenis pekerjaan orangtua rata-rata sebagai nelayan, keluarga mendukung anak untuk sekolah, waktu yang dibutuhkan anak untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah 20 menit dengan jarak tempuh 3km-5km, dan jumlah rata-rata keluarga inti adalah 5 orang.

5.2 SARAN

Saran-saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan dari penelitian, sebagai berikut:

5.2.1 Dinas Pendidikan harus memastikan secara teliti mengenai informasi program wajib belajar 12 tahun agar sampai kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui informasi terbaru, negara bertanggungjawab atas anak-anak yang

kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan tidak ada alasan bagi peserta didik yang tidak mampu tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

5.2.2 Sekolah lebih meningkatkan kegiatan mensosialisasikan kepada orangtua siswa tentang adanya dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu orangtua yang tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aulia, Sitta. 2012. *Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)*. Jurnal Politik Muda, Vol 2, No 1. Universitas Airlangga.
- Berlian, Nur. 2011. *Faktor-Faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 17, Nomor 1, Januari.
- BPS. 2018. *Kecamatan Suradadi dalam Angka 2018*. Tegal: BPS
- Diknas. 2003. *Departemen Pendidikan Nasional Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Diknas.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Tegal: Dinas P dan K.
- Firmansyah, Ferry. 2013. *Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 1, No 2, Mei.
- Fry, H, Keteridge, S.,& Marshall, S. (2009). *A handbook for teaching and learning in higher education enhancing academic practice*. New York: Roudledge,

- Hasanah, Yenny Merinatul. 2017. *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Vol 5, No 2. UNY: Yogyakarta.
- Khirunnisa. 2018. Thesis. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka*. Malang: Universitas Muhammadiyah Pematang.
- Rothbard, M. A. N. (1999). *Education free and compulsory*. Auburn: Ludwig von Mises Institute.
- Saroni, Mohamad. 2013. *Pendidikan untuk Orang Miskin: Membuka Peran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta; Ar-Ruz Media.
- Sriyanto, dan Dewi. 2019. Implementasi Pembelajaran Media Flip Chart dan Powerpoint Materi Dinamika Planet Bumi Sebagai Ruang Kehidupan Kelas X IPS 1 Dan X IPS 2 Ma Al-Asror Semarang.
- Talman, Priyadi, dan Chaeruddin. 2016. *Wajib Belajar 12 Tahun: Tantang Regulasi dan Implementasi*. Jakarta; New Indonesia.
- Vassiliou. A. (2011). *Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulation and statistics*. Brussels: EACEA P9 Eurydice.
- Yenny Merinatul. 2017. *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol 5, No 2, September 2017 (228-239)
- Yusta, Thesar. 2015. *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 3, No 2. Surabaya: Universitas Airlangga.

LAMPIRAN 1

METODE PENGUMPULAN DATA PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

No	Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator Variabel	Teknik Pengumpulan Data	Pengukuran	Analisis Data
1.	Mengetahui pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi	-kecukupan pendidik -ketersediaan sarana dan prasarana pendidik -ketersediaan pembiayaan	-Wawancara -Observasi -Dokumentasi	-pedoman wawancara -lembar observasi -lembar dokumentasi	- Analisis Deskriptif
2.	Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun	Hambatan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun	-Tingkat pendidikan orangtua	-Angket	- skala rating	- Uji statistik deskriptif SPSS (Crosstab/ tabulasi silang)

	tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.	di Kecamatan Suradadi	<ul style="list-style-type: none"> -Tingkat pendapatan orangtua -Jumlah tanggungan orangtua -Faktor Lingkungan tempat tinggal -Faktor Jarak dari rumah ke sekolah -Fasilitas Jalan -Fasilitas Transportasi 			
--	--	-----------------------	--	--	--	--

LAMPIRAN 2

LEMBAR DOKUMENTASI

Tabel Dokumentasi

Jenis Data = Data Primer

Variabel = Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi
Kabupaten Tegal

Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Keterangan
APK dan APM	1.1 Jumlah anak usia sekolah (16-18 tahun)	1.1 Laporan Rutin Bulanan (Dinas P&K)	
	1.2 Jumlah anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan dasar	1.2 Laporan Rutin Bulanan (Dinas P&K)	
	1.3 Jumlah anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah	1.3 Laporan Rutin Bulanan (Dinas P&K)	
	1.4 Nilai APK dan APM	1.4 Laporan Rutin Bulanan (Dinas P&K)	

LAMPIRAN 3

KISI-KISI INSTRUMEN PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Nomor Angket	Jumlah Angket
Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun	Tingkat Pendidikan Orangtua	Ijazah Terakhir	1	1
		Pendidikan Non Formal yang pernah ditempuh	2	1
		Lama sekolah Formal orangtua	3	1
		Lama sekolah Non Formal	4	1
	Tingkat Pendapatan Orangtua	Jumlah pendapatan setiap bulan	5	1
		Jumlah penghasilan sampingan	6	1
		Kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	7	1
		Pendapatan digunakan untuk	8	1
		Sumber pendapatan yang diperoleh	9	1
	Jumlah Tanggungan Orangtua	Jumlah anggota keluarga	10	1
		Jumlah anak	11	1
	Faktor Lingkungan Tempat Tinggal	Dukungan yang diberikan kepada anak	12	1
		Waktu yang diperlukan untuk membimbing anak belajar	13	1
		Tempat tinggal anak	14	1
		Banyaknya anak yang tidak sekolah	15	1
		Aktivitas sehari-hari yang dilakukan anak	16	1
		Kategori teman anak	17	1
		Pentingnya pendidikan	18	1
		Tujuan menyekolahkan anak	19	1
		Dorongan Bapak/Ibu untuk meyekolahkan anak	20	1
	Faktor Jarak dari Rumah ke Sekolah	Waktu yang diperlukan anak dari rumah ke sekolah	21	1

		Jarak dari rumah ke sekolah	22	1
	Faktor Jalan	Kondisi jalan di desa	23	1
		Kondisi jalan ketika musim hujan	24	1
	Fasilitas Transportasi	Kendaraan yang digunakan anak untuk ke sekolah	25	1
		Jumlah angkutan umum yang melewati	26	1
		Jenis transportasi yang melewati	27	1
		Biaya yang dikeluarkan untuk transportasi umum	28	1
		Kecukupan uang yang diberikan untuk biaya transportasi	29	1

LAMPIRAN 4

ANGKET PENELITIAN

Judul : “PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL”.

I. Petunjuk Pengisian

- 1. Sebelum menjawab pertanyaan, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.**
- 2. Angket ini terdiri dari 30 pertanyaan.**
- 3. Berilah tanda (X) pada pilihan yang tersedia menurut jawaban Bapak/Ibu.**

II. Identitas Responden

Nama Orang Tua :

1. Ayah Kandung :
2. Ibu Kandung :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

Variable I : Tingkat Pendidikan

1. Apa ijazah terakhir yang Bapak/Ibu terima?
 - a. SD
 - b. SMA
 - b. SMP
 - d. Lainnya, sebutkan...
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pendidikan non formal (kursus) ?
 - a. Pernah, sebutkan....
 - b. Tidak pernah
3. Berapa lama Bapak/Ibu sekolah formal?
 - a. Kurang dari 6 tahun
 - b. 6-12 tahun
 - c. 13-15 tahun

d. Lebih dari 15 tahun

Variabel 2 : Tingkat pendapatan orangtua

4. Berapa pendapatan pokok tiap bulan yang Bapak/Ibu peroleh?
 - a. Kurang dari Rp.1.500.000
 - b. Rp.1.500.000 - Rp.2.500.000
 - c. Rp.2.500.000 - Rp.3.500.000
 - d. Lebih dari Rp.3.500.000
5. Berapa penghasilan sampingan tiap bulan yang Bapak/Ibu peroleh?
 - a. Kurang dari Rp.1.500.000
 - b. Rp.1.500.000 - Rp.2.500.000
 - c. Rp.2.500.000 - Rp.3.500.000
 - d. Tidak ada sampingan
6. Berapa pengeluaran total Bapak/Ibu setiap bulannya?
 - a. Kurang dari Rp.1000.000
 - b. Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000
 - c. Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000
 - d. Lainnya, sebutkan...
7. Berapa biaya yang dikeluarkan Bapak/Ibu untuk pendidikan anak setiap bulan?
 - a. Kurang dari Rp.100.000
 - b. Rp. 150.000 - Rp. 250.000
 - c. Rp. 250.000 - Rp. 350.000
 - d. Lainnya, sebutkan....
8. Darimanakah biaya yang dikeluarkan oleh Bapak/Ibu untuk menyekolahkan anak?
 - a. Hutang
 - b. Biaya sendiri
 - c. Beasiswa
 - d. Bantuan Operasional Sekolah

Variabel 3 : Jumlah Tanggungan Orangtua

9. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah Bapak/Ibu?
- a. 1-4 orang
 - b. 5-6 orang
 - c. 7-9 orang
 - d. Lebih dari 10 orang
10. Berapa jumlah anak (putra-putri) Bapak/Ibu ?
- a. 1 anak
 - b. 2 anak
 - c. 3 anak
 - d. Lebih dari 3 anak, sebutkan jumlahnya...
11. Berapakah jumlah anggota di luar keluarga inti yang menjadi tanggungan keluarga Bapak/Ibu?
- a. Tidak ada
 - b. 1 orang
 - c. 2 orang
 - d. Lebih dari dua orang

Variabel 4 : Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

12. Dukungan apa yang anda berikan agar anak anda bersedia untuk sekolah?
- a. Motivasi belajar
 - b. Melengkapi semua kebutuhan anak
 - c. Lainnya, sebutkan.....
13. Ketika di rumah, berapa lama bapak/ibu membimbing anak untuk belajar?
- a. Kurang dari 1 jam
 - b. Lebih dari 1 jam
14. Aktivitas sehari-hari apa yang dilakukan anak (usia 16-18 tahun) bapak?
- a. Kursus
 - b. Bekerja
 - c. Menganggur
 - d. Lainnya, sebutkan....
15. Bergaul dengan siapakah anak anda (usia 16-18 tahun) setiap harinya?

- a. Berteman dengan anak usianya/ sebaya yang melanjutkan sekolah
 - b. Berteman dengan anak usianya/ sebaya yang tidak melanjutkan sekolah
 - c. Orang yang sudah bekerja
 - d. Lainnya, sebutkan.....
16. Apa alasan anak Bapak/Ibu tidak melanjutkan Wajib Belajar 12 tahun?
- a. Faktor biaya sekolah
 - b. Faktor dalam diri anak
 - c. Pengaruh teman
 - d. Lainnya, sebutkan,,,,,
17. Apakah ada sosialisasi mengenai Wajib Belajar 12 Tahun dari Dinas Pendidikan?
- a. Ada
 - b. Tidak ada
18. Apakah tujuan bapak/Ibu menyekolahkan anak?
- a. Agar anak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
 - b. Agar anak dapat bekerja di tempat yang layak
 - c. Agar anak menjadi orang yang pintar
 - d. Agar dapat hidup mandiri
19. Apakah ada dana bantuan pendidikan dari lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak/Ibu?
- a. Ada
 - b. Tidak ada

Variabel 5 : Faktor Jarak dari Rumah ke Sekolah

20. Berapa lama waktu yang diperlukan anak Bapak/Ibu dari rumah menuju ke sekolah?
- a. Kurang dari 10 menit
 - b. Antara 10-15 menit
 - c. Antara 16 menit- 25 menit
 - d. Lebih dari 25 menit
21. Berapa jarak antara rumah menuju sekolah?
- a. Kurang dari 1 km

- b. Antara 1-3 km
- c. Antara 3-5 km
- d. Lebih dari 5 km

Variabel 6 : Faktor Jalan

22. Termasuk jenis jalan apakah yang dilalui anak Bapak/Ibu untuk sampai ke sekolah?

- a. Jalan arteri (terdapat lampu lalu lintas, marka jalan, lebar jalan maksimal 8meter)
- b. Jalan kolektor (lebar jalan maksimal 7meter, kecepatan lebih dari 40km/jam, jalan tidak terputus meskipun memasuki daerah kota)
- c. Jalan lokal (jalan tidak terputus walaupun memasuki desa, lebar jalan maksimal 6meter, kecepatan kendaraan lebih dari 20km/jam)

23. Bagaimana kondisi jalan di desa Bapak/Ibu?

- a. Jalan setapak
- b. Berlubang/ berbatu
- c. Beraspal
- d. Lainnya, sebutkan.....

24. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana situasi pada jalan dari rumah menuju sekolah?

- a. Padat lalu lintas
- b. Rawan kecelakaan
- c. Macet

Variabel 7 : Fasilitas Transportasi

25. Transportasi apa yang digunakan oleh anak Bapak/Ibu untuk sekolah?

- a. Angkutan umum
- b. Sepeda motor
- c. Sepeda
- d. Lainnya, sebutkan...

26. Apa alasan anak Bapak/Ibu memilih transportasi tersebut?

- a. Murah
- b. Cepat

- c. Tidak ada pilihan lain
 - d. Lainnya, sebutkan....
27. Berapa jenis transportasi umum yang ada disekitar rumah Bapak/Ibu??
- a. Lebih dari 2, sebutkan....
 - b. Kurang dari 2, sebutkan.....
28. Jam berapa batas transportasi umum beroperasi di daerah tempat tinggal Bapak/Ibu?
- a. Kurang dari jam 5 sore
 - b. Lebih dari jam 5 sore
29. Berapa biaya yang dipakai anak Bapak/Ibu jika berangkat sekolah menggunakan transportasi umum?
- a. Lebih dari Rp 5000
 - b. Antara Rp. 3000 - Rp. 5000
 - c. Antara Rp. 2000 - Rp 3000
 - d. Kurang dari Rp. 2000
30. Apakah di daerah Bapak/Ibu sering terjadi kemacetan pada saat jam berangkat sekolah?
- a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
 - d. Jarang
31. Apakah di tempat tinggal Bapak/Ibu memiliki kemudahan dalam menjangkau angkutan umum/transportasi umum?
- a. Ya
 - b. Tidak

LAMPIRAN 5

Tabel. 16 Tingkat Pendidikan Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ijasah terakhir	SD	33	57,8%
		SMP	10	17,5%
		SMA	5	8,7%
		Tidak Sekolah	9	15,7%
2.	Pendidikan Non-Formal	Penah	2	3,5%
		Tidak pernah	55	96,4%
3.	Lamanya Sekolah Formal	<6 Tahun	9	15,7%
		6-12 Tahun	33	57,8%
		13-15 Tahun	10	17,5%
		>15 Tahun	5	8,7%
4.	Lamanya Sekolah Non-Formal	>3 Bulan	0	0%
		3-6 Bulan	2	3,5%
		>6 Bulan	0	0%
		Tidak Pernah	55	96,4%

Tabel 17. Tingkat Pendapatan Orangtua yang Mempunyai Anak usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pendapatan Setiap Bulan	> Rp. 1.500.000	51	89,4%
		Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	6	10,5%
		Rp. 2.500.000 - Rp 3.500.000	0	0%
		< Rp.3.500.000	0	0%
2.	Pendapatan Sampingan	> Rp. 1.500.000	0	0%
		Rp.1.500.000 - Rp. 2.500.000	0	0%
		Rp. 2.500.000 - Rp 3.500.000	0	0%
		< Rp.3.500.000	0	0%

3.	Kecukupan Kebutuhan Sehari-hari	Kurang dari cukup	43	75,4%
		Tidak cukup	9	15,7%
		Cukup	5	8,7%
		Sangat Cukup	0	0%
4.	Pendapatan digunakan untuk	Membayar hutang	4	7,0%
		Melengkapi Kebutuhan Sehari-hari	51	89,4%
		Melengkapi Kebutuhan Sekolah	2	3,5%
		Menabung	0	0%
5.	Sumber biaya yang diperoleh untuk Sekolah	Hutang	0	0%
		Biaya Sendiri	4	7,0%
		Beasiswa	0	0%
		BOS	53	92,9%

Tabel 18. Jumlah Tanggungan Orangtua yang Mempunyai Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Jumlah Anggota Keluarga	3	6	10,5%
		4	10	17,5%
		5	34	59,6%
		>5	7	12,2%
2.	Jumlah anak	1	6	10,5%
		2	10	17,5%
		3	34	59,6%
		>3	7	12,2%

Tabel 19. Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Keluarga yang Memiliki Anak Usia 16-18 tahun yang Tidak Melanjutkan Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Dukungan yang diberikan Kepada Anak	Memberikan uang untuk hal	51	89,4%

		yang sangat penting		
		Memberikan Uang Saku Setiap Hari	2	3,5%
		Mamfasilitasi Rumah dengan Meja Belajar	3	5,2%
		Melengkapi Semua Kebutuhan Sekolah Anak	1	1,7%
2.	Waktu yang di Butuhkan Bpk/Ibu Membimbing Anak untuk Belajar	<1 jam	57	100%
		1-3 jam	0	0%
		4-5 jam	0	0%
		>5 jam	0	0%
3.	Tempat Tinggal Anak	Tinggal Bersama Kedua Orangtua	49	85,9%
		Tinggal Bersama Saudara	6	10,5%
		Tinggal Bersama Kakek dan Nenek	2	3,5%
		Menempati Tempat Tinggal sendirian	0	0%
4.	Jumlah Anak Lingkungan Tempat Tinggal yang Tidak Sekolah	>30 Anak	35	61,4%
		20-29 Anak	12	21%
		10-19 Anak	10	17,5%
		< 10 Anak	0	0%
5.	Aktivitas yang dilakukan Anak	Kursus	0	0%
		Bekerja	43	75,4%
		Menganggur	8	14%
		Lainnya...	5	8,7%
6.	Berteman dengan Siapa anak Anda	Anak seusianya	7	12,2%
		Anak yang Sekolah seusianya	20	35,0%
		Anak sudah Bekerja	23	40,3%

		Anak yang tidak Sekolah Seusianya	6	10,5%
7.	Peran Pendidikan Bagi Anda	Sangat penting	13	22,8%
		Penting	34	59,6%
		Cukup Penting	8	14,0%
		Tidak Penting	2	3,5%
8.	Tujuan Menyekolahkan Anak	Agar dapat melanjutkan ke Jenjang Lebih Tinggi	2	3,5%
		Agara dapat bekerja di tempat yang layak	13	22,8%
		Agara menjadi orang pintar	12	21,0%
		Agar dapat hidup mandiri	30	52,6%
9.	Bentuk Dorongan Orangtua agar Anak tetap sekolah meski tidak punya biaya	Ya, karena pendiidkan penting bagi kelanjutan hidup	13	22,8%
		Ya, untuk bekal mencari kerja	11	19,2%
		Tidak, takut tidak bisa membiayai	23	40,3%
		Tidak, takut biaya sehari-hari	10	17,5%

Tabel 20. Faktor Jarak dari Rumah ke Sekolah

No	Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Waktu yang diperlukan dari Rumah menuju Sekolah	<10 menit	3	5,2%
		10-15 menit	29	50,8%
		16-25 menit	21	36,8%
		> 25 menit	4	7,0%
2.	Jarak dari rumah ke sekolah	< 1 km	3	5,2%
		1-3 km	14	24,5%
		3-5 km	27	47,3%
		> 5 km	13	22,8%

Tabel. 21 Fasilitas Jalan yang Dilalui dari Rumah Menuju Sekolah

No	Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kondisi Jalan di Desa	Rusak	6	10,5%
		Berlubang	11	19,2%
		Berbatu-batu	35	61,4%
		Beraspal	5	8,7%
2.	Kondisi jalan desa saat hujan	Berkubang air	10	17,5%
		Berbatu-batu	35	61,4%
		Licin	6	10,5%
		Becek	6	10,5%

Tabel 22. Transportasi yang Digunakan untuk Melakukan Perjalanan dari Rumah Menuju ke Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 2019

No	Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Kendaraan yang digunakan Anak untuk ke Sekolah	Angkutan Umum	32	56,1%
		Sepeda Motor	12	21,0%
		Sepeda	13	22,8%
		Jalan kaki	0	0%
2.	Jumlah Angkutan Umum yang melewati	1	0	0%
		2	0	0%
		3	3	5,2%
		>3	54	94,7%
3.	Transportasi umum apa saja yang ada di sekitar	Ojek	2	2,5%
		Mini Bus	53	92,9%
		Becak	1	1,7%
		Lainnya....	0	0%
4.	Biaya untuk naik Angkutan Umum	> Rp. 5000	51	89,4%
		Rp.3000- Rp. 5000	4	7,0%
		Rp. 2000- Rp 3000	2	3,5%
		< Rp. 2000	0	0%
5.	Kecukupan dalam Memberi uang saku	Kurang dari cukup	0	0%
		Tidak Cukup	1	1,7%

	Cukup	54	94,7%
	Sangat Cukup	2	3,5%

LAMPIRAN 6

No	Nama Orangtua	Umur Orangtua	Alamat	Nama Anak	Umur Anak
1.	Slamet	44	Karangwuluh	Ziyan Fitrotun Nisa	17
2.	Mulyadi	46	Karangwuluh	Fahriz Rizki	18
3.	Riyanto	56	Gembong dadi	Nurin Syifaul Maula	16
4.	Mulyadi	44	Gembong dadi	Nur Rizki Umami	16
5.	Asbudi	46	Gembong dadi	Siti Khodijah	17
6.	Cahyono	47	Gembong dadi	Ade Riyanto	16
7.	Puryono	57	Karangmulya	Fina Risky Lahi	18
8.	Munawar	56	Karangmulya	Lia Purwati	16
9.	Faqihudin	40	Karangmulya	Rania Apriyani	17
10.	Maksudi	45	Harjasari	Nur Laela	17
11.	Tarso	39	Harjasari	Febri Mulyana	18
12.	Asep	46	Harjasari	Tegar Maulana	18
13.	Camadi	49	Harjasari	Hanifah	17
14.	Ahmad	50	Harjasari	Febby Maulana Ramadhani	18
15.	Bawon	51	Harjasari	Aziza Hafni Rezki	17
16.	Sakum	55	Harjasari	Akbar	18
17.	Jahidin	56	Kertasari	Dimas Junandar	16
18.	Supin	55	Kertasari	Humi Chasanah	16
19.	Sujer	45	Kertasari	Meita Aliyani	17
20.	Susmito	48	Kertasari	Putri Haryanti	16
21.	Kusnanto	38	Kertasari	Mardina Anisa Dynata	18
22.	Muanas	45	Jatimulya	Naira Aura Disa	16
23.	Ali Afif	50	Jatimulya	Irkham Kurniawan	17
24.	Karmen	59	Jatimulya	Aprilia Wastuti	17
25.	Munawar	60	Jatimulya	Novia Amelia Waswati	18
26.	Dawud	54	Jatimulya	Aditya Adria Romero	18
27.	Dulkhakim	47	Jatimulya	Siti Mariyam	17
28.	Sunarto	48	Jatibogor	Nurul Faik	18
29.	Iswanto	45	Jatibogor	Safira Fitri Ani	17

30.	Bukhaer	40	Jatibogor	Yoga Aji Syahputra	18
31.	Saryo	44	Jatibogor	Meliyanah Fitri	16
32.	Supardi	49	Jatibogor	Siti Yuliana	16
33.	Sudarno	40	Sidoharjo	Rudi Agus Setiawan	17
34.	Ma'muri	52	Sidoharjo	Anita Yuliani	16
35.	Slamet	45	Sidoharjo	Adi Nur Bimasakti	18
36.	Suharto	46	Sidoharjo	Rita Sugiarti	16
37.	Jaidin	50	Sidoharjo	Rindu Bunga Asih Sabrina	17
38.	Niah	51	Purwaha mba	Nova Anggita Furi	17
39.	Misbahudin	55	Purwaha mba	Mohammad Raihan	18
40.	Wastro	40	Purwaha mba	Ani Nopiani	18
41.	Sali	50	Purwaha mba	Siska Mega Utami	17
42.	Kodir	44	Purwaha mba	Elok Faikoh	18
43.	Warmo	52	Purwaha mba	Aniq Shofwani	17
44.	Miskar	38	Suradadi	Maizy Novida	18
45.	Mudlofir	46	Suradadi	Mirna Puspa Ningsih	16
46.	Daklan	55	Suradadi	Awang Prasetyo	16
47.	Ahmad	45	Suradadi	Dewi Putri	17
48.	Wage	48	Suradadi	Anisah	16
49.	Tahuri	47	Suradadi	Dwi Ockta Rizki hartono	18
50.	Sholihin	51	Suradadi	Bagus Saputra	16
51.	Kasturi	52	Suradadi	Niya Saniyah	17
52.	Agus	47	Suradadi	Amila Azzahra	17
53.	Sujianto	53	Suradadi	Ali Akbar	18
54.	Agus Triyanto	48	Suradadi	Fikri Ardiansyah	18
55.	Solichin	53	Bojongsa na	Khismi Riza	17
56.	Kasmui	52	Bojongsa na	Sekar Tanjung Melati	18
57.	Saeful	55	Bojongsa na	Eko Frasetio	16